



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

**PERATURAN WALIKOTA NOMOR
TENTANG**

**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024**

BUKU II

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
- BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- SEKRETARIAT DAERAH
- SEKRETARIAT DPRD
- INSPEKTORAT DAERAH
- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG**



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional menjadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dokumen rencana kerja pemerintah daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

5. Rencana...

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. dinas...

- d. dinas perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
 - e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - f. dinas sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - h. dinas pangan dan pertanian;
 - i. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. dinas perhubungan;
 - k. dinas komunikasi dan informatika;
 - l. dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - m. dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
 - n. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - o. sekretariat daerah;
 - p. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
 - q. Bappeda;
 - r. badan pengelola keuangan daerah;
 - s. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - t. inspektorat;
 - u. kecamatan padang panjang timur;
 - v. kecamatan padang panjang barat; dan
 - w. badan penanggulangan bencana daerah, kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD berkenaan.
- (2) Dalam hal RKPD berkenaan mengalami perubahan, Renja Perangkat Daerah harus mengikuti perubahan.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,



SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023 NOMOR 20

NO	JABATAN	NAMA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Asisten		
3.	Kepala Bappeda		





**PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG**

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**(DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL)**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan..... 2

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 6

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah..... 15

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 26

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat 26

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL 30**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 31

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil 31

3.3 Program dan Kegiatan 33

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL..... 40**

BAB V PENUTUP 47

24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor : 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor : 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang merupakan salah satu Dinas Daerah Eselon II yang melaksanakan urusan wajib pemerintahan dibidang urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan tugas pokok utamanya adalah melaksanakan sebagian tugas yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan fungsi utamanya melakukan :

- a. Perumusan Kebijakan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Setiap tahun sebelum pelaksanaan kegiatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun dan membuat Rencana Kerja yang disingkat dengan RENJA. Rencana Kerja merupakan perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran agar pembangunan yang dilaksanakan mencapai sasaran yang diinginkan. Penyusunan Renja Tahun 2024 saat ini mempedomani RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 Peraturan Menteri

1 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja adalah :

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
 - g. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
 - h. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026;
 - j. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dalam penggunaan anggaran berbasis kinerja dan menunjang kepada pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan merujuk kepada pencapaian RPJPD Kota Padang Panjang, Renstra Kementerian Dalam Negeri, RPJP dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu tahun anggaran yaitu Tahun 2024;
2. Sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dijadikan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2024;
3. Sebagai acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta pedoman dan pengendalian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tahun berjalan;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja serta sistematika penulisannya.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2022) dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, review terhadap rancangan awal Renja serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta program dan kegiatan.

BAB IV : Memuat tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2024

BAB V : Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak memadai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun untuk memenuhi amanat tersebut

Sebelum menyusun Renja Tahun 2024, terlebih dahulu dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu, tahun berjalan serta pencapaian Renstra sebelumnya. Dalam rentang waktu 2019-2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan Renstra yang telah dibuat dan mendukung kepada pencapaian RPD Kota Padang Panjang dengan :

a. Prioritas Pembangunan :

Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang anti KKN

b. Sasaran :

- Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas dan melayani
- Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien

c. Program :

- Pendaftaran Penduduk
- Pencatatan Sipil
- Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan
- Pengelolaan Profil Kependudukan

d. Indikator Sasaran :

- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan
- Lama waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan dokumen administrasi kependudukan

Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Handwritten signature or initials in blue ink.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KOTA PADANG PANJANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	10000,00%	100,00%	100,00%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan dan disampaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%	100,00%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	9 (Laporan)	3 (laporan)	3 (laporan)	3 (laporan)	100%		6 (laporan)	66,67%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN	42 (Bulan)	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	42 bulan	100,00%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	9 (laporan)	3 (laporan)	3 laporan	3 (laporan)	100%		6 laporan	0,67%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran yang disusun	9 (Laporan)	3 (laporan)	3 (laporan)	3 (laporan)	100%		6 laporan	0,67%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis yang disusun	9 (Laporan)	3 (laporan)	3 (laporan)	3 (laporan)	100%		6 laporan	0,67%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	10 (Jenis)	10 (Jenis)	10 jenis	10 jenis	100%	10 Paket	10 jenis	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan yang disediakan	1 (Jenis)	1 (Jenis)	1 jenis	1 jenis	100%	2 jenis	1 jenis	100,00%
		Jumlah jenis paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 (Unit)	1 (Unit)	1 unit	1 unit	100%	2 paket	1 unit	100,00%

	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 (Jenis)	2 (Jenis)	2 jenis	2 paket	100%	2 paket	2 jenis	100,00%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	1032 (Ok)	344 (ok)	344 ok	20 laporan	100%	20 laporan	344 ok	0,33%
		Jumlah makan dan minum rapat dinas yang disediakan	1032 (Ok)	344 (ok)	344 ok	344 ok	100%	344 ok	344 ok	0,33%
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	60(Kali)	20 (kali)	20 kali	20 kali	100%	20 kali	20 kali	33,33%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100,00%	100%		100%	100,00%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	18 (Jenis)	4 (jenis)	6 jenis	3 jenis	50%		3 jenis	0,17%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	100%	100%	100,00%	100%		100%	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik disediakan	144 (Rekening)	48 (tagihan)	48 tagihan	48 tagihan	100%	48 laporan	48 tagihan	0,33%
		Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	144 (Rekening)	48 (tagihan)	48 tagihan	48 tagihan	100%	48 rekening	48 tagihan	0,33%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 (Orang)	6 (Orang)	6 orang	6 orang	100%	6 laporan	6 orang	100,00%
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	6 (Orang)	6 (Orang)	6 orang	6 orang	100%	6 orang	6 orang	100,00%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara	6 (Roda 2)	6 (Roda 2)	6 (Roda 2)	6 (Roda 2)	100%	6 Unit	6 (Roda 2)	100,00%
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	3 (Roda 4)	3 (Roda 4)	3 (Roda 4)	3 (Roda 4)		3 Unit	3 (Roda 4),	100,00%
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 (Roda 4), 6 (Roda 2)	3 (Roda 4), 6 (Roda 2)	3 (Roda 4), 6 (Roda 2)	3 (Roda 4), 6 (Roda 2)		9 unit	3 (Roda 4), 6 (Roda 2)	100,00%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara	17 (Jenis)	17 (Jenis)	17 jenis	-	100%		-	
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 (Unit)	1 (Unit)	1 unit	1 unit	100%		1 unit	

	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%						
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung jasa surat menyurat	2 (Jenis)	2 jenis						
	Kegiatan Pengadaan Cetak Dokumen dan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	30 (Jenis)	30 (Jenis)						
		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 (Jenis)	2 (jenis)						
		Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	2 (Jenis)	1 (jenis)						
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	80 (Laporan)	20 (laporan)						
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, laporan keuangan semesteran, prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun	12 (Laporan)	3 (laporan)						
	Kegiatan Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	10 (Jenis)	10 (jenis)						
		Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	96 (Rekening)	48 (rekening)						
	Kegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	48 (Rekening)	48 (rekening)						
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6 (Roda 2), 3 (Roda 4)	6 roda 2, 3 roda 4						
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan di bersihkan	1 (Unit)	1 (unit)						
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	30 (Jenis)	30 (jenis)						
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 (Jenis)	2 (jenis)						
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	10 (Jenis)	10 (Jenis)						
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1.400 (Ok)	644 (ok)						
	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah keikutsertakan dalam rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	175 (Kali)	70 (kali)						



	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%						
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan								
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	10 (Jenis)	10 (jenis)						
	Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 (Unit)	1 (unit)						
		Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara	10 (Jenis)	10 (jenis)						
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 (Unit)	1 (unit)						
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor	Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara	10 (Jenis)	10 (jenis)						
	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab								
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas dan perlengkapan yang disediakan	140 (stel)							
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	90%	90%						
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	20 (Orang)	4 (orang)						
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100%	100%						
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	20 (Laporan)	20 (laporan)						
	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, laporan keuangan semesteran, prognosis realisasi anggaran dan laporan akhir tahun	3 (Laporan)	3 (laporan)						

	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	98%	95,04%	96%	100%	104%	98,00%	99,99%	100,00%
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk	98%	96%	96%	100%	104%	98,00%	99,99%	100,00%
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis peralatan yang diadakan								
		Jumlah arsip yang didokumentasikan	5500 (Arsip)		2.500 (Arsip)	4.681	187%	4.500 Dokumen	9.181	1,67%
	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	16500 dokumen	73.856	10.000	16.972	169,72%	8.000 Dokumen	98.828	598,96%
		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	35 (Orang)	34 (Orang)	35 (orang)	-			-	
		Jumlah dokumen adiminduk online yang diterbitkan	30.000 (Dokumen)		8.000 (dokumen)	7.174	89,68%	500 Dokumen	7674	0,26%
		Jumlah bidang DAK yang dilaksanakan	1 (Bidang)	1 (bidang)		1 Bidang			1 Bidang	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	98,00%	99,98%	96,00%	99,99%	104%	98,00%	99,99%	100,00%
	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase layanan terhadap penduduk yang belum mendapatkan layanan dokumen akte pencatatan sipil	98,00%	88,00%	96,00%	99,99%	104%	98,00%	99,99%	100,00%
	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan akta pencatatan sipil	6.600 (Akta)	4.125	2000 (Akta)	2.103 (Akta)	105,15%	2.000 Akta	2.103 (Akta)	0,32%

	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	98%	90,33%						
	Kegiatan Peningkatan SDM Administrasi Kependudukan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	33 (Orang)	32 (orang)						
	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Jumlah rapat koordinasi	1(Kali)	1 (kali)						
	Kegiatan Peningkatan SDM Aparatur dan Kualitas Layanan Publik Melalui Go Digital Dukkcapil	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	70 (Orang)	-						
		Jumlah dokumen adminduk online yang diterbitkan	34.000 (Dokumen)	4.229 (Dokumen)						
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan akta pencatatan sipil	8.300 (Akta)	2.592 (akta)						
	Kegiatan Pendokumentasian Dokumen Administrasi Kependudukan Secara Digital	Jumlah arsip yang tertata	9.000 (Arsip)	3.410 (Arsip)						
	Kegiatan DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah bidang DAK yang dilaksanakan	1 (Bidang)	1 (bidang)						
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	54	19	17	17	100,00%	2 Kali	17	100,00%
	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah data kependudukan yang tersaji secara berkala	24		12	12	100,00%	1 Data	12	100,00%
	Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah validitas elemen data golongan darah	6000 orang		3000 Orang	3.000	100,00%	100 Orang	3000	0,50%
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan	32 (Kali)	1.051	15 (kali)	15 (kali)	100,00%	2 Kali	15 (kali)	0,47%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Lama waktu penyelenggaraan fasilitasi	2 tahun		1 tahun	12 (bulan)	100,00%	0 Tahun	12 (bulan)	0,50%
		Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan						12 Laporan		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	10 OPD		5 OPD	19 OPD	380,00%	2 Dokumen	19 OPD	1,90%
		Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	10 OPD		5 OPD	19 OPD	380,00%	5 OPD	19 OPD	1,90%
	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat						2 Dokumen		
		Jumlah media untuk publikasi	10 (Media)	5 (media)	5 (media)	5 (media)	100,00%	5 Media	5 (media)	0,50%
		Jumlah inovasi baru	7 (Inovasi)	5 (inovasi)						

	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Keakuratan data	99,86%	99,90%	99,90%	100%	100%	99,98%	99,95%	100,00%
	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Profil Kependudukan dan Agregat Kependudukan yang tersaji	2 (Dokumen) 300 (Buku)	2 (Dokumen) 300 (Buku)		2 dokumen (150 buku)		2 Dokumen	2 dokumen (150 buku)	0,50%
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan lainnya	Jumlah dokumen profil/ agregat kependudukan	2 (Dokumen) 300(Buku)	2 (Dokumen) 300 (Buku)						
	Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota	Jumlah data kependudukan Kabupaten/Kota						3 Dokumen		
		Jumlah dokumen profil/ agregat kependudukan	2 (Dokumen) 300 (Buku)		2 (dokumen) 150 (buku)	2 (dokumen) 150 (buku)	100,00%	109 buku	2 (dokumen) 150 (buku)	0,50%
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	Persentase keakuratan data	99,98%	100%						
	Kegiatan Validasi dan Pemutakhiran Data Kependudukan	Jumlah KK yang tervalidasi	16.000 (KK)	15.975 (KK)						
	Kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	4 (kali)	-						
		Jumlah dokumen profil / agregat kependudukan	2 (dokumen)	2 (dokumen)						
	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring	Jumlah publikasi informasi pelayanan	1 (PYRING) 5 media cetak dan 2 media elektronik	1 (PYRING) 5 media cetak dan 2 media elektronik						
	Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Data melalui Kerjasama dengan OPD/Lembaga	Jumlah lembaga pengguna/OPD	24 OPD							
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Berstandarkan ISO 9001 : 2015	Jumlah akses melalui aplikasi paduko	4.000 (Akses)	4.495 (Akses)						

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Program dan Kegiatan sesuai hasil evaluasi Renja tahun yang lalu telah memenuhi target kinerja.

Faktor keberhasilan/penyebab tercapainya kinerja program/kegiatan :

1. Adanya dukungan (komitmen pimpinan) dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
2. Tersedianya sumber daya manusia yang handal pada Dinas Dukcapil;
3. Tersedianya peralatan yang memadai dalam mendukung penerbitan dokumen kependudukan;
4. Adanya inovasi-inovasi pelayanan yang mendukung percepatan penerbitan dokumen kependudukan.

Faktor penghambat kinerja program/kegiatan :

1. Terbatasnya anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Adanya gangguan jaringan SIAK terpusat secara online.

Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor keberhasilan/faktor penghambat capaian kinerja :

1. Perlu adanya dukungan dan komitmen pimpinan daerah bersama legislatif dalam hal penganggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Untuk perencanaan anggaran agar terukur secara sistematis sehingga Perangkat Daerah lebih Optimal untuk pencapaian Visi Misi Kota.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam rangka menjalankan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan fungsinya melakukan :

- a. Perencanaan, Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pengelolaan dan penatausahaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

e. Dan Pelaksanaan tugas tugas lain yang diserahkan Walikota sesuai dengan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang selama Tahun 2022 telah melakukan kinerjanya dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal tersebut dapat dilihat melalui gambaran mengenai perkembangan jumlah penduduk dan Kepala Keluarga di Kota Padang Panjang sebagai berikut:

**PERTUMBUHAN PENDUDUK TAHUN 2022
KOTA PADANG PANJANG**

No	KECAMATAN/ KELURAHAN	TAHUN 2021				TAHUN 2022				PER TUM BUH AN
		JENIS KELAMIN		JML	%	JENIS KELAMIN		JML	%	
		LK	PR			LK	PR			
I	KEC. PADANG PANJANG TIMUR	12,987	12,757	25,744	42.81	13,239	13,005	26,244	42.97	1.91
1	GANTING	1,649	1,573	3,222	5.36	1,666	1,633	3,299	5.40	2.33
2	SIGANDO	1,006	978	1,984	3.30	1,053	1,005	2,058	3.37	3.60
3	EKOR LUBUK	1,378	1,311	2,689	4.47	1,364	1,297	2,661	4.36	-1.05
4	NGALAU	1,588	1,621	3,209	5.34	1,634	1,648	3,282	5.37	2.22
5	GUGUK MALINTANG	3,451	3,456	6,907	11.49	3,530	3,559	7,089	11.61	2.57
6	KOTO PANJANG	2,375	2,311	4,686	7.79	2,405	2,305	4,710	7.71	0.51
7	KOTO KATIK	633	618	1,251	2.08	643	631	1,274	2.09	1.81

8	TANAH PAK LAMBIK	907	889	1,796	2.99	944	927	1,871	3.06	4.01
II	KEC. PADANG PANJANG BARAT	17,292	17,101	34,393	57.19	17,502	17,329	34,831	57.03	1.26
1	BUKIT SURUNGAN	1,309	1,318	2,627	4.37	1,304	1,322	2,626	4.30	-0.04
2	PASAR USANG	1,960	2,005	3,965	6.59	1,943	1,982	3,925	6.43	-1.02
3	KAMPUNG MANGGIS	3,842	3,695	7,537	12.53	3,915	3,753	7,668	12.56	1.71
4	SILAING BAWAH	3,133	3,061	6,194	10.30	3,251	3,193	6,444	10.55	3.88
5	SILAING ATAS	1,315	1,259	2,574	4.28	1,318	1,258	2,576	4.22	0.08
6	PASAR BARU	835	831	1,666	2.77	828	839	1,667	2.73	0.06
7	TANAH HITAM	1,811	1,884	3,695	6.14	1,826	1,886	3,712	6.08	0.46
8	BALAI-BALAI	3,087	3,048	6,135	10.20	3,117	3,096	6,213	10.17	1.26
	KOTA PADANG PANJANG	30,279	29,858	60,137	100.0 0	30,741	30,334	61,075	100.0 0	1.54

SUMBER : DKB PUSAT (DATA SEMESTER 2 2022)

Dilihat dari Tabel Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Padang Panjang dari Tahun 2021-2022 terdapat peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 terdapat peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,54% dari Tahun 2021 dengan kepemilikan KK 100%.

Selanjutnya dilihat dari kepemilikan KTP elektronik yaitu penduduk yang telah merekam KTP-elektronik penduduk Kota Padang Panjang dari Tahun 2021-2022 sebagai berikut :

**Perkembangan Jumlah Penduduk Wajib KTP
dan telah Memiliki KTP elektronik Tahun 2021-2022**

No	KECAMATAN/ KELURAHAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		WAJIB KTP	KEPEMILIK AN KTP	%	WAJIB KTP	KEPEMILIK AN KTP	%
I	KEC. PADANG PANJANG TIMUR	17,788	17,763	99.86%	18,597	18,131	97.49%
1	GANTING	2,175	2,173	99.91%	2,312	2,257	97.62%
2	SIGANDO	1,378	1,377	99.93%	1,449	1,410	97.31%
3	EKOR LUBUK	1,906	1,904	99.90%	1,954	1,902	97.34%
4	NGALAU	2,168	2,167	99.95%	2,258	2,196	97.25%
5	GUGUK MALINTANG	4,741	4,731	99.79%	4,962	4,840	97.54%
6	KOTO PANJANG	3,280	3,273	99.79%	3,396	3,305	97.32%
7	KOTO KATIK	878	876	99.77%	915	897	98.03%
8	TANAH PAK LAMBIK	1,262	1,262	100.00 %	1,351	1,324	98.00%
II	KEC. PADANG PANJANG BARAT	23,908	23,875	99.86%	24,839	24,197	97.42%
1	BUKIT SURUNGAN	1,862	1,861	99.95%	1,894	1,846	97.47%
2	PASAR USANG	2,797	2,793	99.86%	2,824	2,765	97.91%
3	KAMPUNG MANGGIS	5,175	5,168	99.86%	5,405	5,278	97.65%

4	SILAING BAWAH	4,332	4,329	99.93%	4,621	4,500	97.38%
5	SILAING ATAS	1,772	1,769	99.83%	1,828	1,780	97.37%
6	PASAR BARU	1,127	1,126	99.91%	1,157	1,113	96.20%
7	TANAH HITAM	2,620	2,614	99.77%	2,686	2,620	97.54%
8	BALAI-BALAI	4,223	4,215	99.81%	4,424	4,295	97.08%
	KOTA PADANG PANJANG	41,696	41,638	99.86%	43,436	42,328	97.45%

Dilihat dari Tabel Perkembangan Kepemilikan KTP elektronik penduduk Kota Padang Panjang dapat dilihat bahwa realisasi perekaman KTP elektronik penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2022 sudah 100 %. Realisasi ini sudah melampaui target nasional.

Selanjutnya dari sisi Pencatatan Sipil yaitu Akta Kelahiran dalam hal Kepemilikan akta Kelahiran Penduduk di Kota Padang Panjang selama Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Kota Padang Panjang
Tahun 2021-2022**

No	KECAMATAN/ KELURAHAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		JUMLAH PENDUDUK	PUNYA AKTA	%	JUMLAH PENDUDUK	PUNYA AKTA	%
1	KEC. PADANG PANJANG TIMUR	25,744	23,620	91.75%	26,244	24,154	92.04%
1	GANTING	3,222	2,877	89.29%	3,299	2,944	89.24%
2	SIGANDO	1,984	1,942	97.88%	2,058	1,999	97.13%
3	EKOR LUBUK	2,689	2,363	87.88%	2,661	2,352	88.39%

4	NGALAU	3,209	3,009	93.77%	3,282	3,100	94.45%
5	GUGUK MALINTANG	6,907	6,288	91.04%	7,089	6,489	91.54%
6	KOTO PANJANG	4,686	4,314	92.06%	4,710	4,356	92.48%
7	KOTO KATIK	1,251	1,213	96.96%	1,274	1,228	96.39%
8	TANAH PAK LAMBIK	1,796	1,614	89.87%	1,871	1,686	90.11%
II	KEC. PADANG PANJANG BARAT	34,393	31,658	92.05%	34,831	32,165	92.35%
1	BUKIT SURUNGAN	2,627	2,402	91.44%	2,626	2,405	91.58%
2	PASAR USANG	3,965	3,740	94.33%	3,925	3,693	94.09%
3	KAMPUNG MANGGIS	7,537	6,776	89.90%	7,668	6,994	91.21%
4	SILAING BAWAH	6,194	5,768	93.12%	6,444	5,986	92.89%
5	SILAING ATAS	2,574	2,371	92.11%	2,576	2,385	92.59%
6	PASAR BARU	1,666	1,475	88.54%	1,667	1,486	89.14%
7	TANAH HITAM	3,695	3,520	95.26%	3,712	3,560	95.91%
8	BALAI-BALAI	6,135	5,606	91.38%	6,213	5,656	91.03%
	KOTA PADANG PANJANG	60,137	55,278	91.92%	61,075	56,319	92.21%

Pada Tabel Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2021-2022 dapat dilihat bahwa setiap tahun realisasi Penduduk Kota Padang Panjang yang memiliki Akta Kelahiran mengalami peningkatan. Pada Tahun 2022 kepemilikan akta kelahiran meningkat dari Tahun 2021 sebesar 100%. Melihat masih terdapatnya penduduk Kota Padang Panjang yang belum memiliki Akta Kelahiran sampai akhir Tahun

2022 maka hal tersebut akan menjadi perhatian untuk Renja selanjutnya bagaimana seluruh penduduk Kota Padang Panjang memiliki Akta Kelahiran.

Kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Beberapa kinerja pelayanan pada Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pemahaman aparatur pengelola administrasi kependudukan dan masyarakat dalam hal proses penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan dan Bimbingan Teknis yang diadakan Pemerintah Pusat dan Provinsi;
- b. Peningkatan realisasi terhadap target perekaman KTP elektronik melalui kegiatan perekaman KTP elektronik ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang Panjang, Kelurahan-kelurahan, rumah-rumah penduduk, dan masyarakat penyandang disabilitas;
- c. Jumlah realisasi kepemilikan Akta Kelahiran penduduk di Kota Padang Panjang yang meningkat dengan diadakannya kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil ke Kelurahan-kelurahan di Kota Padang Panjang, serta melibatkan Ketua RT masing-masing kelurahan untuk kepengurusan akta kelahiran penduduk;
- d. Meningkatnya informasi pendaftaran penduduk pada masyarakat melalui media cetak dan elektronik dalam hal pengurusan dokumen kependudukan;
- e. Terlaksananya rapat koordinasi dalam hal perumusan kebijakan kependudukan dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se- Sumatera Barat;
- f. Terlaksananya penataan arsip pencatatan sipil dan dokumen kependudukan Kota Padang Panjang dalam bentuk file data per Keluarga yang disusun menurut RT, Kelurahan, dan Kecamatan, serta dokumen kependudukan lainnya seperti arsip surat keterangan pindah;

2. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Beberapa kinerja pelayanan pada bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- a. Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, perawatan peralatan SIAK serta *ter-update*-nya data dan program SIAK yang mendukung pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. Peningkatan pemahaman aparatur pengelola SIAK dengan diikutinya pelatihan mengenai pengelolaan SIAK oleh aparatur pengelola SIAK
- c. Keakuratan data kependudukan di Kota Padang Panjang tahun 2022 sebesar 99.95%.
- d. Tersedianya data kependudukan melalui kegiatan penerbitan buku Profil Perkembangan Kependudukan dan Buku Agregat Kependudukan di Kota Padang Panjang yang datanya dapat dipergunakan oleh dinas/instansi serta pengguna lainnya;
- e. Telah difasilitasinya 19 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mengakses data kependudukan melalui Data Ware House Terpusat;
- f. Dinas Dukcapil Tahun 2022 sebagai OPD terinovatif dalam Lomba Inovasi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- g. Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang Juara II Kota Tingkat Provinsi pada Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2022;
- h. Penghargaan dari Walikota Padang Panjang atas Pencapaian dan Kinerja sebagai PPID Pembantu Terbaik Tahun 2022;
- i. Peringkat 1 atas prestasi dalam Penilaian Evaluasi Kinerja OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2022.

Untuk melihat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang berdasarkan Sasaran Renstra Priode 2018-2024 dan menurut Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintah Dalam Negeri tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Perekaman KTP Elektronik			100%	97.5%	97,55%	97.60%	97.45%		97,55%	97.60%	
2.	Penerbitan Akta Perkawinan			100%	100%	100	100	93.13%		100	100	
3.	Penerbitan Akta Perceraian											
4.	Penerbitan Akte Kematian			100%	100	100	100	100%		100	100	
5.	Penyajian Data Kependudukan			100%	150	150		150%		150		
6.	Persentase anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)			90%	90%	98%	98%	98.24%		98%	98%	



NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
7.	Kepemilikan Akta Kelahiran			92%	92,5%	93%	93.5%	92.21%		93%	93.5%	
8.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama			23	23			95.83				

Memperhatikan Tabel 2.2 dapat diungkapkan bahwa :

1. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk selalu terealisasi diatas target, hal ini dilatarbelakangi karena meningkatnya animo masyarakat mengingat KTP dibutuhkan untuk banyak keperluan.
2. Cakupan Penerbitan KTP yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan sebagai tindaklanjut Program Nasional "Single Identity Number",
3. KTP nasional yang diterbitkan telah berbasis NIK semenjak tahun 2012 hingga saat ini.
4. Selama Tahun 2022 tidak ada masyarakat yang mengajukan permohonan penerbitan akta perceraian.
5. Cakupan Penerbitan Akta Kematian selalu terealisasi diatas target.
6. Semenjak berdirinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kami terus membangun database sehingga ketersediaan database kependudukan skala kota selalu tersedia sesuai kebutuhan dan sejak tahun 2012 data yang tersedia telah dikonsolidasikan dengan data di seluruh Indonesia.
7. Penerbitan KIA terfasilitasi melalui kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dengan berbagai strategi dan inovasi pelayanan.
8. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran juga selalu terealisasi diatas target. Hal ini juga dipengaruhi dengan adanya pembebasan biaya retribusi dan denda, mensosialisasikan kebijakan secara berkala setiap tahunnya, pelayanan jemput bola dan melibatkan Tim Lintas Sektor dalam pencapaian target Penerbitan Akta Kelahiran.
9. Rasio bayi berakta kelahiran sudah terealisasi diatas target. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kerjasama dengan Rumah Sakit dan bidan-bidan dalam hal Pelayanan: Lahir, Pulang Bawa Akta dan pelayanan langsung ke Kelurahan.
10. Sejak Tahun 2020 terdapat 23 (dua puluh tiga) OPD telah menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan data. Dengan adanya kerjasama diharapkan semua OPD dapat menggunakan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan pasal 58 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013

Dalam mencapai target-target kinerja diatas, sangat didukung oleh ketersediaan anggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang Panjang yang menjadi isu-isu penting adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan Administrasi/dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Masih kurangnya minat masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan melalui pelayanan online "PADUKO"
3. Rendahnya pemahaman masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan.
4. Masih adanya penduduk usia > 17 Tahun yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Maka perlu dilakukan upaya penataan Administrasi Kependudukan demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kota Padang Panjang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan maka dapat disimpulkan bahwa semua program yang terdapat dalam rancangan awal RKPD terlaksana dengan baik. Proses ini dilakukan untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat capaian hasil baik dari segi pendanaan maupun realisasi fisiknya. Disamping itu jika terjadi rancangan awal berbeda dengan hasil pelaksanaan maka akan kelihatan dengan jelas.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Padang Panjang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.013.136.700	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.013.136.700	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.013.136.700	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.013.136.700	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	3.365.911.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	3.365.911.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang Panjang	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100%	2.415.462.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang Panjang	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100%	2.415.462.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang/bulan	2.415.462.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang/bulan	2.415.462.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Padang Panjang	Persentase pemenuhan administrasi kepegawalan perangkat daerah	100%		Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Padang Panjang	Persentase pemenuhan administrasi kepegawalan perangkat daerah	100%		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Panjang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	20 stel	9.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Panjang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	35 stel		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	3 laporan	210.793.900	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	3 laporan	210.793.900	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	3.523.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	3.523.100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	19.272.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	19.272.800	
	Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	9.998.000	Penyediaan Barang Percetakan dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	9.998.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan	178.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan	178.000.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang Panjang	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	256.928.160	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang Panjang	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	256.928.160	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	13 jenis	256.928.160	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	13 jenis	256.928.160	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Padang Panjang	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Padang Panjang	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang Panjang	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	261.252.940	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang Panjang	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100%	261.252.940	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan	54.333.740	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan	54.333.740	
	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 laporan	206.919.200	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 laporan	206.919.200	

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang Panjang	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100%	221.474.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang Panjang	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100%	221.474.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 unit	120.354.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 unit	120.354.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah unit gedung kantor yang direhab	1 unit	60.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah unit gedung kantor yang direhab	1 unit	60.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		41.120.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		41.120.000	
Program Pendaftaran Penduduk	Padang Panjang	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	99%	235.955.000	Program Pendaftaran Penduduk	Padang Panjang	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	99%	235.955.000	
Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Padang Panjang	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk	100%	67.121.000	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Padang Panjang	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk	100%	67.121.000	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Padang Panjang	Jumlah arsip yang didokumentasikan	4.500 dokumen	49.895.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Padang Panjang	Jumlah arsip yang didokumentasikan	4.500 dokumen	49.895.000	
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Padang Panjang	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan	9 laporan	17.226.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Padang Panjang	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan	9 laporan	17.226.000	
Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Padang Panjang	Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana	100%	145.605.000	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Padang Panjang	Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana	100%	145.605.000	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Padang Panjang	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pendaftaran penduduk yang disusun	1 sertifikat ISO 9001:2017	-	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Padang Panjang	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pendaftaran penduduk yang disusun	1 sertifikat ISO 9001:2017	-	
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Padang Panjang	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-EI, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	12 Jenis Formulir Pelayanan	145.605.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Padang Panjang	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-EI, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	12 Jenis Formulir Pelayanan	145.605.000	
Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Padang Panjang	Jumlah jenis penyelenggaraan pendaftaran penduduk	1 jenis	23.229.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Padang Panjang	Jumlah jenis penyelenggaraan pendaftaran penduduk	1 jenis	23.229.000	
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Padang Panjang	Jumlah peserta sosialisasi	35 orang	23.229.000	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Padang Panjang	Jumlah peserta sosialisasi	35 orang	23.229.000	
Program Pencatatan Sipil	Padang Panjang	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun	100%	180.824.800	Program Pencatatan Sipil	Padang Panjang	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun	100%	180.824.800	
Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Padang Panjang	Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 Tahun	2.000 akta	180.824.800	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Padang Panjang	Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 Tahun	2.000 akta	180.824.800	
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Padang Panjang	Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil	2000 dokumen	180.824.800	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Padang Panjang	Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil	2000 dokumen	180.824.800	

Program Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	Padang Panjang	Presentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	205.447.400	Program Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	Padang Panjang	Presentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	205.447.400	
Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	12 kali	-	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	12 kali	-	
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data	1 dokumen		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data	1 dokumen		
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Padang Panjang	Jumlah laporan penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan	12 laporan	178.318.250	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Padang Panjang	Jumlah laporan penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan	12 laporan	178.318.250	
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Padang Panjang	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12 laporan	30.000.000	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Padang Panjang	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12 laporan	30.000.000	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Padang Panjang	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	12 Dokumen	23.979.950	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Padang Panjang	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	12 Dokumen	23.979.950	
	Padang Panjang	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	5 OPD	-		Padang Panjang	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	5 OPD	-	
	Padang Panjang	Jumlah Personal Dukcapil yang mengikuti peningkatan kapasitas	35 Orang	-		Padang Panjang	Jumlah Personal Dukcapil yang mengikuti peningkatan kapasitas	35 Orang	-	
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Padang Panjang	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 laporan	-	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Padang Panjang	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 laporan	-	
Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Padang Panjang	Jumlah media publikasi yang digunakan	5 media	124.338.300	Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Padang Panjang	Jumlah media publikasi yang digunakan	5 media	124.338.300	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Padang Panjang	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 laporan	27.129.150	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Padang Panjang	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 laporan	27.129.150	
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Padang Panjang	Jumlah peserta bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data	70 org	27.129.150	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Padang Panjang	Jumlah peserta bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data	70 org	27.129.150	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Padang Panjang	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 Dokumen	24.998.500	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Padang Panjang	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 Dokumen	24.998.500	
Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Padang Panjang	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 Dokumen	24.998.500	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Padang Panjang	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 Dokumen	24.998.500	
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah data kependudukan Kabupaten/Kota	13 Dokumen	24.998.500	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah data kependudukan Kabupaten/Kota	13 Dokumen	24.998.500	

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Berkenaan dengan penelaahan usulan program dan kegiatan yang datang dari masyarakat, untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program dan Kegiatan disusun untuk pemberian kesadaran kepada masyarakat dan tidak ada usulan itu yang datang dari masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan Misi Kementerian Dalam Negeri untuk :

1. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat dan daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung operator yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Untuk mencapai Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Efektif dengan Didukung Operator yang Berkompeten dan Pengawasan yang Efektif dalam Rangka Pemantapan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan tujuan yaitu : Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan didukung oleh Database yang Akurat dan Terpercaya.

Untuk mendukung tujuan tersebut, selama 5 (lima) tahun terakhir Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menginisiasi kebijakan revolusioner bidang administrasi kependudukan yang dikenal dengan 14 langkah besar yaitu :

1. Pelayanan dokumen kependudukan terintegrasi 3 in 1, 4 in 1 sampai 6 in 1.
2. Pembuatan KTP-el tanpa pengantar RT/RW, Desa/Kelurahan cukup dengan membawa foto copy KK.
3. Perekaman data dan pembuatan KTP-el yang tidak mengubah elemen data boleh dibuat di luar domisili.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk percepatan cakupan akta kelahiran.
5. Membangun ekosistem: data dan dokumen kependudukan digunakan untuk semua keperluan.
6. Layanan akta kelahiran online.
7. Pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan.

8. Pindah datang tanpa pengantar RT, RW, desa atau kecamatan. Cukup datang ke dinas dukcapil dengan membawa KK.
9. Penyajian data penduduk sampai tingkat desa berbasis kewilayahan (geographic information system).
10. Tindakan afirmatif/kemudahan (Pelayanan untuk Pemilih Pemula, suku baduy, Papua, Lapas, orang sakit).
11. Dukcapil Go Digital, yaitu semua dokumen ditandatangani secara elektronik.
12. Pemberian identitas untuk semua usia yaitu KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA).
13. Face recognition dengan foto KTP-el untuk penegakan hukum.
14. Pendirian Program Diploma 4 Dukcapil berkerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo untuk menciptakan SDM Dukcapil yang profesional.

Dua langkah terakhir tidak bisa diimplementasikan oleh Dinas Dukcapil di daerah lantaran merupakan kewenangan pusat.

Selanjutnya Visi Misi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah :

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan Pemerintah Dalam Negeri”.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri adalah :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga Kebhinekaan, Persatuan dan Kesatuan, Demokratisasi serta Karakter Bangsa dan Stabilitas Politik Dalam Negeri.
2. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri dalam rangka pamentapan pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Desa melalui efektifitas penyelenggaraan Desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan Daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada masyarakat, peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efesien, pendayagunaan administrasi kependudukan serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Untuk Visi Misi Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil melekat pada Visi Misi Kementerian Dalam Negeri.



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja	Rumus	Target 2024	OPD
a.Perekaman KTP Elektronik	$\frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 Tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 Tahun ke atas}} \times 100\%$	97,55%	Disdukcabil
b.Persentase anak usia 1-17 kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah anak usia 1-17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 1-17}} \times 100\%$	98%	Disdukcabil
c.Kepemilikan Akta Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah Anak usia 0-18 yang memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah Anak usia 0-18}} \times 100\%$	99,85%	Disdukcabil
d.Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	-	Disdukcabil

Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang merupakan pelaksanaan dan realisasi pertahun dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

24

1. Meningkatkan persentase kualitas program penunjang urusan pemerintahan kota.
2. Meningkatkan persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk.
3. Meningkatkan persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil.
4. Meningkatkan jumlah lembaga/OPD yang mengakses dan memanfaatkan data kependudukan
5. Meningkatkan persentase keakuratan data

Sedangkan yang menjadi sasaran dari Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan persentase kualitas program penunjang urusan pemerintahan kota.
2. Terwujudnya peningkatan persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk.
3. Terwujudnya peningkatan persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil.
4. Terwujudnya peningkatan jumlah lembaga/OPD yang mengakses dan memanfaatkan data kependudukan
5. Terwujudnya peningkatan persentase keakuratan data.

3.3 Program dan Kegiatan

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Kegiatan :
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain
2. Program Pendaftaran Penduduk dengan kegiatan :
- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan Sub Kegiatan :
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - b. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk dengan Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk
 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai Kebutuhan
 - c. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dengan Sub Kegiatan :
 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil dengan Kegiatan ;
- a. Pelayanan Pencatatan Sipil dengan Sub Kegiatan :
 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan :
- a. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan Sub Kegiatan :
 - Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan Sub Kegiatan
 - Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan Kegiatan :
- a. Penyusunan Profil Kependudukan dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Data Kependudukan.

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4,022,136,700					3,829,746,723
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4,022,136,700					3,829,746,723
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4,022,136,700		-			3,829,746,723
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100%	3,374,911,000		-	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	2,976,343,023
2.12.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Padang Panjang	100%	2,415,462,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2,294,383,523
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Padang Panjang	294 Orang/bulan	2,415,462,000	APBD		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang/bulan	2,294,383,523
2.12.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Padang Panjang	100%	9,000,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		0
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Padang Panjang	20 paket	9,000,000	APBD		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	20 paket	0
2.12.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Padang Panjang	100%	210,793,900			Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	3 laporan	161,515,900
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Padang Panjang	4 paket	3,523,100	APBD		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	3,554,000
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Padang Panjang	4 paket	19,272,800	APBD		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	19,524,000
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Padang Panjang	12 paket	9,998,000	APBD		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	27,987,900
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Padang Panjang	24 laporan	178,000,000	APBD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan	110,450,000



2.12.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	Padang Panjang	100%	256,928,160			Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan		20,000,000
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Padang Panjang	13 unit	256,928,160	APBD	Meja rapat 1 paket, Lemari Arsip 3 buah, Meja 1/2 biro 9 buah, Meja biro 4 buah, AC 3 unit, Filing Cabinet 2 unit, Komputer PC 1 unit, Printer 3 buah dan Alat perekam mobile KTP-el 1 paket.	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	9 jenis	20,000,000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Padang Panjang	1 unit	-	APBD		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	0
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Padang Panjang	100%	261,252,940			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	260,089,600
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Padang Panjang	48 laporan	54,333,740	APBD		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 laporan	95,456,000
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Padang Panjang	12 laporan	206,919,200	APBD		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 laporan	164,633,600
2.12.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	Padang Panjang	100%	221,474,000			Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik		240,354,000
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Padang Panjang	9 unit	120,354,000	APBD		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 unit	120,354,000
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	Padang Panjang	1 unit	60,000,000	APBD		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	1 unit	60,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			41,120,000			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		60,000,000
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	Padang Panjang	99%	235,955,000			Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	98%	508,008,100
2.12.02.2.01	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk	Padang Panjang	98%	67,121,000			Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk	100%	161,751,100
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah arsip yang didokumentasikan	Padang Panjang	4,500 dokumen	49,895,000	APBD		Jumlah arsip yang didokumentasikan	2.500 Arsip	

2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Padang Panjang	13 laporan	17,226,000	APBD		Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	13 laporan	161,751,100
2.12.02.2.02	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana	Padang Panjang	100%	145,605,000			Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana	100%	245,690,000
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	Padang Panjang	10000 dokumen	145,605,000	APBD		Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	2.500 keping blangko KIA	245,690,000
2.12.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Padang Panjang	1 jenis	23,229,000			Jumlah jenis penyelenggaraan pendaftaran penduduk	1 jenis	100,567,000
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	Padang Panjang	1 laporan	23,229,000	APBD		Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	300 orang	100,567,000
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun	Padang Panjang	100%	180,824,800			Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun	100%	139,688,100
2.12.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 Tahun	Padang Panjang	2.000 akta	180,824,800			Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 Tahun	2.000 akta	139,688,100
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Padang Panjang	2000 dokumen	180,824,800	APBD		Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	2000 layanan	139,688,100
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	Presentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Padang Panjang	100%	205,447,400			Presentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	180,707,500
2.12.04.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan	Padang Panjang	12 laporan	178,318,250			Jumlah laporan penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan	12 laporan	143,960,000
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Padang Panjang	12 laporan	30,000,000	APBD		Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12 laporan	32,000,000
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Padang Panjang	2 Dokumen	23,979,950	APBD		Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	12 Dokumen	20,000,000
2.12.04.2.03.07	Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Padang Panjang	5 dokumen	124,338,300	APBD		Jumlah Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5 media	91,960,000

2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Padang Panjang	1 laporan	27,129,150			Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 laporan	36,747,500
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	Padang Panjang	70 org	27,129,150	APBD		Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	1 laporan	36,747,500
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	Padang Panjang	3 Dokumen	24,998,500			Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 Dokumen	25,000,000
2.12.05.2.01	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	Padang Panjang	3 Dokumen	24,998,500			Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 Dokumen	25,000,000
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah data kependudukan Kabupaten/Kota	Padang Panjang	3 Dokumen	24,998,500	APBD		Jumlah data kependudukan Kabupaten/Kota	15 data	25,000,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana Program dan kegiatan prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024 berisi program dan kegiatan untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah.

Sumber dana yang dibutuhkan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Restra OPD	Rencana Tahun 2024						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PERANGKAT DAERAH
				Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.022.136.700						3.829.746.723	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										3.829.746.723	
2 12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.022.136.700							
2 12 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		100 Persen	3.374.911.000					100 Persen	2.976.343.023	
2 12 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	2.415.462.000		Memperkuat Stabilitas Polihukharkam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif		100 Persen	2.294.383.523	
2 12 01 2.02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294 Orang/bulan	2.415.462.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukharkam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif		294 Orang/bulan	2.294.383.523	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	9.000.000		Memperkuat Stabilitas Polihukharkam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif		0 Persen		
2 12 01 2.05 0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Paket	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukharkam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif		0 Paket		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	210,783,000		Memperkuat Stabilitas Polihukankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompetensi harmonis loyal adaptif dan kolaboratif		100 Persen	161,516,000	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	3,523,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompetensi harmonis loyal adaptif dan kolaboratif		4 Paket	3,554,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIP
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	19,272,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompetensi harmonis loyal adaptif dan kolaboratif		4 Paket	19,524,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIP
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	9,995,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompetensi harmonis loyal adaptif dan kolaboratif		12 Paket	27,987,900	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIP
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	178,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompetensi harmonis loyal adaptif dan kolaboratif		24 Laporan	110,450,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIP
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 Persen	256,928,160		Memperkuat Stabilitas Polihukankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompetensi harmonis loyal adaptif dan kolaboratif		100 Persen	20,000,000	
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	256,928,160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompetensi harmonis loyal adaptif dan kolaboratif		2 Unit	20,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIP

2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi			100 Persen	261,262,940		Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif			100 Persen	260,089,600	
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	48 Laporan	54,333,740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif			48 Laporan	95,456,000	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIP
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	12 Laporan	206,919,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif			12 Laporan	164,633,600	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIP
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkategori baik			100 Persen	221,474,000		Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif			100 Persen	240,364,000	
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	9 Unit	120,354,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif			9 Unit	120,354,000	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIP
2	12	01	2.09	0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	17 Unit	41,120,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif			17 Unit	60,000,000	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIP

2	12	01	2.09	0009	Penelitian/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	1 Unit	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif	1 Unit	60,000,000	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPL
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk			100 Persen	238,968,000				100 Persen	608,008,100	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk			99 Persen	17,226,000		Memperkuat Stabilitas Polihukankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif	99 Persen	161,761,100	
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	13 Laporan	17,226,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif	13 Laporan	161,751,100	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPL
2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	4500 Dokumen	49,695,000		Memperkuat Stabilitas Polihukankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif			DNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPL
2	12	02	2.02		Penstaaan Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana			100 Persen	145,606,000		Memperkuat Stabilitas Polihukankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif	100 Persen	245,690,000	
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	10000 Dokumen	145,605,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif	10000 Dokumen	245,690,000	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPL
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis penyelenggaraan pendaftaran penduduk			1 jenis	23,229,000		Memperkuat Stabilitas Polihukankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif	1 jenis	109,667,000	

2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	1 Laporan	23,229,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BERAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif	1 Laporan	100,567,000	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPL
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun			100 Persen	180,824,800				100 Persen	139,688,100	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan ekte kelahiran usia 0-18 Tahun			2000 akta	180,824,800		Memperkuat Stabilitas Polihukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BERAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif	2000 akta	139,688,100	
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	2000 Layanan	180,824,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BERAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif	2000 Layanan	139,688,100	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPL
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			100 Persen	208,447,400				100 Persen	180,707,600	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan			12 laporan	178,318,250		Memperkuat Stabilitas Polihukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BERAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif	12 laporan	143,860,000	
2	12	04	2.03	0003	Facilitasi Terkai Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	12 Laporan	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BERAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif	12 Laporan	32,000,000	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPL
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	2 Dokumen	23,979,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BERAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif	2 Dokumen	20,000,000	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPL

2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	124,338,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif	5 Dokumen	91,960,000	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SPL
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi		1 laporan	27,129,160		Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif	1 laporan	38,747,500	
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	27,129,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif	1 Laporan	38,747,500	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SPL
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan		3 Dokumen	24,998,500				3 Dokumen	26,000,000	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan		3 dokumen	24,998,500		Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif	3 dokumen	26,000,000	
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	24,998,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif	3 Dokumen	25,000,000	DNAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SPL

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Renja digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik sejalan dengan target dan sasaran pembangunan yang telah disepakati. Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi juga menjadi titik tolak dalam pencapaian visi misi yang telah dirumuskan dalam Renstra maupun Rencana Kerja

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan. Adapun kaidah yang diambil adalah :

1. Rencana kerja ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Kota Padang Panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
2. Renja ini bisa tersusun setelah sebelumnya dilakukan evaluasi terhadap realisasi pencapaian target kinerja baik dari segi fisik maupun dari segi keuangannya.
3. Diharapkan kepada seluruh pelaksana kegiatan agar memaksimalkan kegiatan- kegiatan dengan anggaran yang tersedia sehingga hasilnya dapat memenuhi target kinerja.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang akan dapat dicapai tahun 2024 dan bermanfaat sebagai pedoman pada tahun-tahun berikutnya.

Padang Panjang, Agustus 2023

KEPALA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

Dra. MAINI, MM

Pembina Utama Muda, NIP.19640505 199003 2 007





PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN LALU.....	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	7
	2.2 Kinerja Analisis Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan..	16
	2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	18
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
	2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.....	31
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	32
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan...	36
	3.3 Program dan Kegiatan	38
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	44
BAB V	PENUTUP	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berperan penting dalam mendukung dan mencapai tujuan Pemerintah Kota Padang Panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang panjang perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun antar daerah, sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi

Dalam Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing bidang dan bagian di lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan melakukan identifikasi permasalahan dan tantangan yang dirangkum dalam isu-isu strategis di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan dimana dengan semakin pesatnya perkembangan informasi, maka masyarakat menuntut adanya diversifikasi dalam layanan Perpustakaan Umum. Layanan yang diharapkan masyarakat bukan sekedar layanan peminjaman bahan pustaka yang tercetak dan terekam dan menelusuri informasi di Perpustakaan, namun lebih dari itu. Masyarakat menuntut perlunya layanan jemput bola sehingga masyarakat tidak kehabisan waktu.

1

Membicarakan Kearsipan tentu tidak lepas dari membicarakan arsiparis sebagai orang yang bertanggungjawab mengelola kearsipan. Citra Kearsipan sangat dipengaruhi oleh citra arsiparisnya. Persoalan-persoalan klasik selalu muncul, yakni seputar masalah kurang perhatiannya Bidang Kearsipan oleh suatu instansi atau masih rendahnya kesadaran Perangkat Daerah dalam mengelola Kearsipan.

Untuk mengatasi hal tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang sesuai dan selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, meliputi :

1. Tahap perumusan rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, meliputi :
 - a. Pengolahan data dan informasi;
 - b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - e. Telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran;
 - g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - h. Perumusan kegiatan prioritas;
 - i. Penyajian awal dokumen rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - j. Penyempurnaan rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - k. Pembahasan forum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Tahap penyajian rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- e. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- i. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- j. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
- k. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- l. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
- m. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12)

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disusun adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024, serta menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 2.2 Kinerja Analisis Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Secara umum, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik mencapai 100%.

Untuk lebih jelasnya, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 dapat dijelaskan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KOTA PADANG PANJANG

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Urusan Penunjang Pemerintahan	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%

	Daerah Kabupaten/Kota	atas pelayanan administrasi perkantoran								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN	14 bulan	14 bulan	14 Bulan	14 Bulan	100%	14 Bulan	14 Bulan	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	14 Bulan	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Jenis Bahan dan Alat untuk Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Tersedia	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan dan Jumlah peralatan dan kebersihan disediakan	22 jenis	22 jenis	22 jenis	22 jenis	100%	22 jenis	22 jenis	100%

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan jumlah fotocopy yang disediakan	5 jenis	5 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	375 ok	337 ok	6 jenis	6 jenis	100%	150 kali	150 kali	100%
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	183 kali	120 kali						
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	4 unit	4 unit	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	4 unit	4 unit	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Penunjang Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Tersedia	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	60 tagihan	60 tagihan	5 rekening	5 rekening	100%	60 tagihan	60 tagihan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	16 orang	16 orang	16 orang	16 orang	100%	16 orang	16 orang	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara dan Jumlah Gedung yang Diadakan	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6 unit	6 unit	6 unit	11 unit	183%	6 unit	6 unit	100%

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dipelihara jenis gedung yang	46 unit	46 unit	46 unit	46 unit	100%	46 unit	46 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara, Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	3 unit	3 unit	1 unit	3 unit	300%	3 unit	3 unit	100%
	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah anggota pustaka	2025 orang	2307 orang	2525 orang	3091 orang	100%	3025 orang	3025 orang	100%
	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang mengunjungi perpustakaan	25000 orang	25720 orang	28800 orang	28920 orang	100%	30600 orang	30600 orang	100%
	Pengelolaan dan Pengembangan Pustaka	Jumlah bahan bacaan yang diadakan Jumlah sopir tenaga pengolah bahan pustaka, tenaga penerjemah	1 Jenis 1 orang 2 orang	1 Jenis 1 orang 2 orang	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	3 jenis	3 jenis	100%

	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase minat baca masyarakat	50%	50%	50%	49,99%	100%	50%	50%	100%
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Borang dossier Kegiatan temu penyair Lomba pengembangan minat baca	1 Jenis 1 orang 2 orang	1 Jenis - 2 orang	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	4 kali lomba pengemban ngan minat baca 48 kali perpustak aan keliling 1 kali kegiatan Temu Penyair se Asia Tenggara	4 kali lomba pengemban ngan minat baca 48 kali perpustakaa n keliling 1 kali kegiatan Temu Penyair se Asia Tenggara	100%
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	DED pembangunan LKC Frekuensi kegiatan kelas kreatif Jumlah biaya perjalanan dinas forum Jumlah insentif pengelola TBM Jumlah lomba bunda literasi Jumlah lomba TBM Jumlah pengurus an notaris TBM	1 dokumen 48 kelas 6 kali 300 orang 6 kali 10 kali 4 akte	1 dokumen 48 kelas 6 kali 300 orang 6 kali 10 kali 4 akte	- 3 lomba bunda literasi - 250 eks Cetak buku Bunda Literasi	- 48 kelas kreatif - 3 lomba bunda literasi - 250 eks Cetak buku Bunda Literasi	100%	3 lomba bunda literasi 3 lomba TBM 80 Kegiatan Bina fasilitator untuk 8 TBM 6 kali biaya perjalana n dinas forum	3 lomba bunda literasi 3 lomba TBM 80 Kegiatan Bina fasilitator untuk 8 TBM 6 kali biaya perjalanan dinas forum	100%

	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	29,16%	29,16%	42%	60,85%	100%	63%	63%	100%
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip dinamis	-	-	10 OPD	10 OPD	100%	15 OPD	15 OPD	100%
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Frekwensi pengawasan ke OPD, 3 OPD terbaik, sosialisasi kearsipan	-	-	10 OPD	15 OPD	100%	1 Laporan 3 OPD	1 Laporan 3 OPD	100%
	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Arsip Statis yang Telah Tersedia di JIKN	12,5%	12,5%	37,5%	50%	100%	40%	40%	100%
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah menduplikasikan arsip ke aplikasi arsip (TAMBO) Jumlah pemenang lomba arsiparis tingkat nasional Pembelian printer	3 OPD 1 orang 1 unit	3 OPD 1 orang 1 unit	600 dokumen	3 OPD, 600 dokumen	200%	5 OPD	5 OPD	100%

	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip statis yang terselamatkan	12500 dokumen	13249 dokumen	4500 Dokumen	10128 Dokumen	100%	5000 Dokumen	5000 Dokumen	100 %
	Perlindungan dan Penyelamatan Akibat Bencana Berskala Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang diperbaiki	-	-	37,5%	37,5%	100%	40%	40%	100%
	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Persentase jumlah arsip covid 19 pd OPD terkait/ jumlah OPD yang terkait	-	-	-	-	-	50%	50%	100%
	Pemulihan Penyimpanan dan Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip yang terpelihara	-	-	15 dokumen	14 dokumen	100%	15 dokumen	15 dokumen	100%
	Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang dialihmediakan	3500 dokumen	4010 dokumen	50%	50%	100%	75%	75%	100%
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip statis yang dialihmediakan Upah tenaga operator dan penata arsip Pembelian laptop Pembelian PC	1000 berkas 2 orang 1 unit 1 unit	1000 berkas 2 orang 1 unit 1 unit	1600 dokumen	1000 dokumen 2 orang tenaga operator dan penata arsip	100%	1500 berkas	1500 berkas	100%

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2018-2023, untuk tahun anggaran 2022 telah dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan pada APBD Kota Padang Panjang Tahun 2022 dan APBD Perubahan Tahun 2022 yang terdiri dari 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 18 (delapan belas) sub kegiatan.

2.2 Kinerja Analisis Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 didasarkan pada review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Analisa juga menyajikan perkiraan realisasi capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 serta proyeksi realisasi capaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 dan tahun 2024. Pencapaian terhadap indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang meliputi indikator sasaran, indikator program, SPM, sesuai dengan tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PADANG PANJANG

NO	INDIKATOR	SPM/STAN DAR NASIONAL	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian				Proyeksi	
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan		Persentase Peningkatan Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	7%	8%	9%	-	-	7%	8%	8,50%		-	-
2.	Meningkatnya Penyelamatan, Pembinaan dan Penataan Arsip Secara Baku		Persentase Pencipta Arsip yang Melaksanakan Kearsipan secara Baku	30%	35%	40%	-	-	30%	35%	45%		-	-
3	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	-	-	44	46	-	-	-	86,54	86,97	86,79
4	Meningkatnya penyelamatan, pembinaan dan penataan arsip secara baku		Nilai LAKE	-	-	-	78 (BB)	80 (BB)	-	-	-	79,89 (BB)	80 (BB)	80,5 (BB)

Berdasarkan target kinerja yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2018-2023 realisasi capaian kinerja tahun 2022 melebihi 100% dimana capaian kinerja Bidang Perpustakaan yakni 197% sedangkan Bidang Kearsipan yakni 102%, sedangkan tahun 2019 s.d 2021 mencapai 100% kecuali pada sasaran Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan” tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan adanya covid 19 sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan pada Perpustakaan.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan OPD yang bertugas dan berfungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang perpustakaan dan kearsipan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja eks Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi tahun sebelumnya serta capaian kinerja Renstra eks Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, dapat dianalisis serta dirumuskan beberapa isu penting yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perencanaan rencana kerja tahun 2024.

Permasalahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan:

1. Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat

Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupaya meningkatkan minat dan budaya membaca kepada masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan minat baca tersebut adalah melaksanakan kegiatan lomba – lomba seperti, lomba bercerita bagi siswa SD dan SMP, Story Telling dan Menulis Kreatif, Bedah Buku, Lomba Kreatifitas bagi masyarakat serta membuka layanan perpustakaan keliling di Sekolah dan Kelurahan dan penyelenggaraan layanan pinjam antar perpustakaan (*inter library loan*

service). Disamping itu juga tersedia alternatif layanan perpustakaan, baik perpustakaan sekolah, perpustakaan kelurahan, perpustakaan masjid, perpustakaan masyarakat/TBM, perpustakaan keliling, dan juga kerja sama dengan Toko Buku Gramedia melaksanakan Kegiatan Buku bergulir kepada masyarakat yang berada dilingkungan Kota Padang Panjang.

Disamping kegiatan-kegiatan tersebut untuk lebih menggiatkan dan mendorong masyarakat menjadi gemar membaca, perpustakaan perlu mengintensifkan upaya untuk meningkatkan kegiatan gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan. Pembudayaan kegemaran membaca dapat dilakukan melalui penyediaan buku-buku berkualitas dan murah serta dengan mengembangkan pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana belajar non formal.

Hal ini harus dilakukan mengingat, membaca belum menjadi kebutuhan dan kebiasaan hidup di masyarakat. Padahal membaca merupakan satu kunci menuju sebuah peradaban dan kebudayaan yang lebih baik. Dengan membaca, cakrawala berpikir akan terbuka dan meningkatkan ilmu pengetahuan.

Kebiasaan membaca inilah yang harus ditanamkan pada masyarakat sejak dini, sehingga dengan kesadaran membiasakan diri untuk membaca sebagai bagian dari hidupnya, dan pada akhirnya tercipta budaya gemar membaca masyarakat terutama generasi muda yang akan meningkatkan pengetahuan dan memberikan manfaat di masa mendatang.

2. Mengoptimalkan pelayanan Perpustakaan.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di perpustakaan memang sudah merupakan keharusan, agar perpustakaan tetap diminati dan tidak termarginalkan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara positif, kreatif dan konstruktif menjadikan kegiatan dan operasi perpustakaan berjalan lebih sinergi, harapan masyarakat pengguna perpustakaan terpenuhi dan efektivitas layanan perpustakaan dapat dicapai.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memang memberi peluang yang sangat luas kepada perpustakaan untuk melakukan inovasi dan pembaruan-pembaruan dalam berbagai kegiatan dan operasi perpustakaannya. Nilai-nilai yang menjadi dasar profesi pustakawan tetap sama, tetapi cara nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam kegiatan dan operasi mengalami perubahan secara mendasar. Salah satu sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang adalah mengembangkan perpustakaan berbasis teknologi informasi. Penyediaan sumber daya informasi berbasis Teknologi tidak cukup memadai, tetapi harus dilengkapi dengan sumber daya berbasis elektronik yang jumlah dan kecepatan penyebarannya terus meningkat.

Oleh karena itu usaha-usaha yang harus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), antara lain melalui pelaksanaan otomasi, digitalisasi koleksi, penyediaan dan pelayanan koleksi elektronik, seperti: e-book, e-journal untuk penelusuran on-line dengan dilengkapi sarana penelusurannya, yaitu e-catalog. Disamping itu sudah saatnya kini perpustakaan menyediakan hotspot area, untuk mendampingi layanan internet dengan terminal komputer yang terbatas.

Walaupun demikian, karena pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada berbagai kegiatan atau operasinya di perpustakaan, nilai efisiensi dan efektivitas adalah tujuannya, maka pertimbangan, pemikiran, dan perhitungan secara cermat harus dilakukan sebelum memutuskan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti misalnya dalam kasus menentukan model penyediaan, perlu memiliki atau cukup dengan menyediakan akses.

3. Meningkatkan sistem pengelolaan arsip di OPD dan lembaga kearsipan secara baku.

Meningkatkan penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan arsip. Hal ini akan meningkatkan kualitas arsip yang ada. Arsip yang berkualitas akan menjadi sumber informasi yang akurat.

Pelayanan arsip yang prima bagi masyarakat, akan memberikan manfaat meningkatnya kualitas informasi arsip yang bisa diakses masyarakat. Tujuan akhirnya, masyarakat akan belajar dan mengetahui pentingnya arsip dalam kehidupan, sehingga budaya sadar arsip akan tersosialisasikan secara tidak langsung.

4. Pengelolaan dan pengawasan kearsipan dilakukan agar penataan arsip lebih baik pada setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Penataan arsip yang baik akan memberi manfaat jangka panjang bagi pengelolaan administrasi OPD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 dapat dijelaskan pada Tabel 2.4

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Padang Panjang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	100 %	3.651.014.552,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	100 %	4.160.527.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang Panjang	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN	14 Bulan	2.812.779.682,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang Panjang	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN	14 Bulan	3.188.822.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2.812.779.682,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.188.822.000,00	

						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Padang Panjang	Persentase Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	100 %	13.000.000,00	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	13.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	199.605.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	199.605.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	6.605.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6.605.000,0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	33.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan kebersihan disediakan	25 Paket	33.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	10.000.000,00	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	150.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	150.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang Panjang	Persentase jumlah penunjang lancarnya pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	100%	498.629.870,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang Panjang	Persentase jumlah penunjang lancarnya pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	100%	614.100.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	6.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	48.049.870,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	48.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	448.080.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	560.100.000,00	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang Panjang	persentase jumlah gedung dan jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100%	140.000.000,00	140.000.000,00	Padang Panjang	Persentase jumlah gedung dan jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100%	145.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	90.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	90.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	22.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	3 Unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	33.000.000	
2.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Padang Panjang	Jumlah anggota pustaka	3500 Orang	729.724.130,00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Padang Panjang	Jumlah anggota pustaka	3200 Orang	728.974.000,00	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	Padang Panjang	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan	33000 Oran g	360.009.530,00	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	Padang Panjang	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan	31000 Orang	387.088.000,00	

	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	25 Eksemplar	28.500.000,00						
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Padang Panjang	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	4 Perpustakaan	43.200.000,00	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Padang Panjang	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	4 Perpustakaan	43.200.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16 Orang	11.924.300,00						

	Pengembangan Bahan Pustaka	Padang Panjang	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	500 Eksemplar	35.000.000,00	Pengembangan Bahan Pustaka	Padang Panjang	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	500 Eksempl a	64.100.000,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Padang Panjang	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	241.385.230,00	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Padang Panjang	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksempl ar	279.788.000,00	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Padang Panjang	Persentase minat baca masyarakat	50%	369.714.600,00	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Padang Panjang	Persentase minat baca masyarakat	50%	341.886.000,00	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Padang Panjang	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	68 Lokus	271.271.200,00	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Padang Panjang	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	68 Lokus	267.814.200,00	

	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Padang Panjang	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	74.071.800,00	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Padang Panjang	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	74.071.800,00	
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 Orang	24.371.600,00						
						PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Padang Panjang	Persentase peningkatan koleksi naskah kuno	25 %	25.000.000,00	
						Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Koleksi naskah kuno	8 Naskah	25.000.000,00	
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Padang Panjang	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	1 Orang	25.000.000,00	

3.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Padang Panjang	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	50%	25.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Padang Panjang	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	50 %	25.000.000,00	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	Padang Panjang	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip dinamis yang baik	15 OPD	25.000.000,00	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	Padang Panjang	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip dinamis	15 OPD	25.000.000,00	
	Pengawasan arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Laporan	25.000.000,00	Pengawasan arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Laporan	25.000.000,00	
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Padang Panjang	Persentase jumlah arsip statis yang telah tersedia di JIKN	50%	0,00	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Padang Panjang	Jumlah arsip statis yang telah tersedia di JIKN,	20%	20.191.800	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Padang Panjang	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIK	300 Pengguna	0,00	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Padang Panjang	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIK	- Pengguna	0,00	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	Padang Panjang	Jumlah arsip statis yang terselamatkan/juml	5000 dokumen	92.471.200,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN	Padang Panjang	Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan	5000 Dokumen	92.471.200,00	

	PENYELAMATAN ARSIP		ah arsip yang tersimpan pada LKD			ARSIP		pada LKD			
	Perlindungan dan Penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kab/Kota	Padang Panjang	Persentase jumlah arsip yang diperbaiki	50%	22.000.000,00	Perlindungan dan Penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kab/Kota	Padang Panjang	Persentase jumlah arsip yang diperbaiki	50%	22.000.000,00	
	Pemulihan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	Padang Panjang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1000 Arsip	22.000.000,00	Pemulihan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	Padang Panjang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	15 Arsip	22.000.000,00	
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip alihmedia kota	75%	70.471.200,00	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip alihmedia kota	75%	70.471.200,00	
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Padang Panjang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1000 Arsip	70.471.200,00	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Padang Panjang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1000 Arsip	70.471.200,00	

Pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) awal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk tahun 2024 ada beberapa sub kegiatan yang tidak sesuai kebutuhan untuk tahun 2024. Dimana atas hasil analisis kebutuhan yang dilakukan kebutuhan belanja untuk tahun 2024 lebih tinggi dari pada rancangan awal RKPD tahun 2024.

2.5 Penelahaan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja tahun 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), antara lain kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, serta dari berbagai informasi dalam pelaksanaan musrenbang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam RPJMN 2020-2024 dimana terdapat 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional diantaranya yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda Pembangunan Nasional tersebut dalam pelaksanaan pembangunannya, difokuskan atau diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan daya ungkit besar terhadap pembangunan nasional serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Penjabaran dari 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas diantaranya yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah.
 - b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang
 - c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif
 - d. Memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah
 - e. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan social
 - c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
 - f. Pengentasan kemiskinan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada :

- a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan.
- b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan.
- c. Revolusi mental dalam sistem social.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk

			Hasil Pemeriksaan APIP					Hasil Pemeriksaan APIP			
2,1,6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Padan g Panjan g	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakat an	Rp 10.000.000	Kerja Sama Pengawasan Internal	Padan g Panjan g	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakat an	Rp -	
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Padan g Panjan g	Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan	100%	Rp 45.000.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Padan g Panjan g	Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan	100%	Rp 45.276.300	
2.2.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Padan g Panjan g	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	1 Laporan	Rp 2.500.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Padan g Panjan g	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	1 Laporan	Rp 2.476.300	
2.2.2.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Padan g Panjan g	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan	Rp 42.500.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Padan g Panjan g	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan	Rp 42.800.000	
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Padan g Panjan g	Capaian MCP Jumlah OPD dengan SAKIP > 60 (15 OPD)	89 Persen 18 OPD	Rp 177.200.00 0	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Padan g Panjan g	Capaian MCP Jumlah OPD dengan SAKIP > 60 (15 OPD)	100 Persen 23 OPD	Rp 134.042.80 0	

3.1	Pendampingan dan Asistensi	Pada g Panjan g	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilaksanakan	50%	Rp 177.200.000	Pendampingan dan Asistensi	Pada g Panjan g	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilaksanakan	50%	Rp 134.042.800	
3.1.1.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pada g Panjan g	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	23 Perangkat Daerah	Rp 50.760.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pada g Panjan g	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	23 Perangkat Daerah	Rp 40.980.000	
3.1.1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pada g Panjan g	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	23 OPD	Rp 10.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pada g Panjan g	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	23 Perangkat Daerah	Rp 10.700.000	
3.1.2.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pada g Panjan g	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	Rp 66.440.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pada g Panjan g	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	Rp 55.430.000	
3.1.3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pada g Panjan g	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan	23 Perangkat Daerah	Rp 40.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pada g Panjan g	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan	23 Perangkat Daerah	Rp 16.932.800	

			n, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					n, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
3.2	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Padan g Panjan g	Persentase Pendampinga n dan Asistensi yang tuntas dilaksanakan	50%	Rp 10.000.000	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Padan g Panjan g	Persentase Pendampinga n dan Asistensi yang tuntas dilaksanakan	50%	Rp 10.000.000	
3.2.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Padan g Panjan g	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	1 Rekomend asi	Rp 10.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Padan g Panjan g	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	1 Rekomend asi	Rp 10.000.000	

2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk Tahun Anggaran 2024, tidak ada usulan program atau kegiatan dari kelompok masyarakat untuk Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang. Dapat dilihat pada tabel 2.5 (terlampir)

Tabel 2.5

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Padang Panjang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi*	Indikator Kerja	Besaran/ Volume	Catatan*
1	2	3	4	5	6

27

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Yang menjadi arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan sasaran Tahun 2024, Terselenggaranya pengawasan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan :

1. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah mencapai nilai Sangat Baik.
2. 95% Perangkat Daerah menyusun LKjIP secara benar dan tepat.
3. Renstra Perangkat Daerah yang sinkron dengan RPJMD 100%.
4. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi terlaksana 100 %.

Selain hal tersebut diatas Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang juga diperintahkan untuk mengawal kebijakan nasional dalam rangka pemulihan ekonomi nasional antara lain pengawasan vaksinsasi dan monitoring Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Inspektorat juga diminta untuk melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini. Hal ini semakin menegaskan fungsi dan peran Inspektorat yang sangat *vital* dalam rangka mengawal kebijakan nasional maupun kebijakan Pemerintah Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Sasaran adalah bagian dari tujuan, sasaran adalah outcome (yang telah dirancang) yang diinginkan untuk pencapaian tujuan. Sasaran harus dapat dicapai dan memungkinkan dalam jangka waktu tertentu dan bersifat jangka pendek, kurang permanen dari pada tujuan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka merealisasikan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Definisi Operasional	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
						TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP Kota						B (61,2)	B (66,3)	BB (70,1)
			Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP	Hasil Nilai Quality Assurance Dalam Menilai Tingkat Maturitas SPIP			2	2	3
			Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat	Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat berdasarkan Survei yang dilakukan oleh Inspektorat			60%	70%	80%
			Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Hasil Nilai Quality Assurance Dalam Menilai Tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang			3	3	3

Pada Tahun 2024 terdapat 2 (dua) target Indikator Kunci (IKK) yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam mewujudkannya yaitu :

No	Indikator Kerja Pembangunan Daerah	Rumus	Target Tahun 2024	Sumber Data
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (Level 1/2/3/4/5) berdasarkan laporan QA oleh BPKP RI	Level 3	BPKP RI
2.	Peningkatan Kapabilitas APIP	Tingkat Kematangan PK APIP (Level 1/2/3/4/5) berdasarkan laporan QA oleh BPKP RI	Level 3	BPKP RI

Namun demikian, target IKK tersebut tentu tidak bisa hanya dilaksanakan oleh Inspektorat saja, namun perlu dukungan dari seluruh stakeholder di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang terutama terkait dengan capaian Maturitas SPIP.

Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang merupakan pelaksanaan dan realisasi pertahun dari Renstra Inspektorat sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah :
 - a. Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
 - b. Meningkatnya Penanganan Kasus Pengaduan dan Pemeriksaan Khusus di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
 - c. Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Temuan
 - d. Meningkatnya Kapabilitas/Tata Kelola APIP

- e. Meningkatnya Maturitas SP
- f. Meningkatnya Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
- g. Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Padang Panjang
- 2. Meningkatnya Penerapan Zona Integritas :
 - a. Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas
 - b. Meningkatnya Pengendalian Gratifikasi
 - c. Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan Pungli di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
 - d. Meningkatnya Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegritas
 - e. Meningkatnya Penanganan Laporan Walikota
 - f. Meningkatnya Monitoring E-LHKPN dan E-LHKASN

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan kegiatan pada Tahun 2024 yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan yaitu :

 - 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor.
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- d) Pemeliharaan Mebel
- e) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan:

- a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- c) Reviu Laporan Kinerja
- d) Reviu Laporan Keuangan
- e) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu., dengan sub kegiatan:

- a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- b) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri 1 kegiatan yaitu :

1. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan:

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
- b. Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

2. Perumusan Kebijakan

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kota Padang Panjang

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	INSPEKTORAT DAERAH				5.482.565.960					5.400.702.960
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6 0 1	URUSAN PENGAWASAN				5.482.565.960					5.400.702.960
6 0 1 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah		90 Persen	4.967.919.100			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	93 Persen	4.738.942.960
6 0 1 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	4.126.507.000			Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	4.150.000.000

6	0	0	2	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang g. Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	462 Orang/b ulan	4.126.507.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490	4.150.000.000
6	0	0	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	68.332.800			Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	36.000.000
6	0	0	2.05	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang g. Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	40 Paket	14.500.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40Paket	-
6	0	0	2.05	00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kota Padang Panjang g. Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	40 Orang	53.832.800	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	36.000.000
6	0	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat		90 Persen	265.068.500			Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat	90 Persen	198.942.960

6	0	0	2	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	4 Paket	3.108.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.100.000
6	0	0	2	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	1 Paket	10.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000
6	0	0	2	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	4 Paket	39.790.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Laporan	20.842.960
6	0	0	2	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	12 Paket	24.999.500	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000

27

6	0	0	2	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kota Padang Panjang g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	5 Laporan	9.996.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	10.000.000
6	0	0	2	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	150 Laporan	177.175.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	130.000.000
6	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 Persen	82.046.000			Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	29.000.000
6	0	0	2	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	3 Unit	55.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-
6	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	- Kota Padang Panjang g, Semua	80 Persen	263.010.800			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	90 Persen	219.000.000

						<i>n Daerah yang terpenuhi</i>	<i>Kecamatan, Semua Kel/Desa</i>					<i>Daerah yang terpenuhi</i>		
6	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000
6	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	25.046.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	27.000.000
6	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	235.964.800	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	190.000.000
6	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkategori baik		100 Persen	190.000.000			Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkategori baik	100 Persen	135.000.000

Handwritten signature

6	0	0	2	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	8 Unit	95.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	85.000.000
6	0	0	2	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kota Padang Panjang g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	1 Unit	30.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	30.000.000
6	0	0	2	00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	5 Unit	5.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	-
6	0	0	2	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	10 Unit	10.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10.000.000

27

6	0	0	2	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang g, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	50.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Rehab kantor untuk penambahan ruangan Irbn	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000
6	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan		88 Persen	380.604.060			Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	90 Persen	455.000.000
6	0	0	2	01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditan		70 Persen	335.327.760			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditan	75 Persen	400.000.000
6	0	0	2	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	- Kota Padang Panjang g, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	50.050.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	60.000.000
6	0	0	2	01	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kota Padang Panjang g, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Laporan	215.917.760	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	125 Laporan	230.000.000

R A

6	0	0	2	00	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	- Kota Padang Panjang g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	1 Laporan	19.870.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	30.000.000
6	0	0	2	00	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	- Kota Padang Panjang g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	1 Laporan	15.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	25.000.000
6	0	0	2	00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	- Kota Padang Panjang g, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	3 Dokumen	34.490.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen	55.000.000
6	0	0	2	02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan		100 Persen	45.276.300			Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan	100 Persen	55.000.000

6	0	0	2	00	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.476.300	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	2.500.000
6	0	0	2	00	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	42.800.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan	52.500.000
6	0	0			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP		91 Persen	134.042.800			Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	92 Persen	206.760.000
6	0	0	2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan		50 Persen	10.000.000			Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan	50 Persen	10.000.000
6	0	0	2	00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Rekomendasi	10.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	10.000.000

6	0	0	2		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan		87 Persen	124.042.800			Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan	88 Persen	196.760.000
6	0	0	2	00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 perangkat daerah	40.980.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	23 perangkat daerah	50.760.000
6	0	0	2	00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 perangkat daerah	10.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	23 perangkat daerah	10.000.000
6	0	0	2	00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kegiatan	55.430.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	76.000.000
6	0	0	2	00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan	23 perangkat daerah	16.932.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan	23 perangkat daerah	60.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 4.1.

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024**

TAHUN 2024																
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH						5.482.565.960,00							8.149.000.000,00	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						5.482.565.960,00							8.149.000.000,00	
6.01		INSPEKTORAT DAERAH						5.482.565.960,00							8.149.000.000,00	
6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah	95%			90 %	4.967.919.100,00						93%	6.969.000.000,00	
6.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan yang Dibayarkan Tepat Waktu	100%			100 %	4.126.507.000,00			Mempertu i Stabilitas Polihukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelongg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelongga raan pemor intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompoten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	100%	5.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

27

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	133 Orang/bulan			30 Orang/bulan	4.126.507.000,00	Kota Padang Pangaj, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pertukaran Dan Trans formasi Pelayanan Publik	Meningkat an kualitas tata kelola penyelenggara an pemer intahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkat an kinerja p enyelenggara an pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	45 Orang/bulan	5.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai	100 %			100 %	68.332.800,00			Memperkuat Stabilitas Pertukaran Dan Trans formasi Pelayanan Publik	Meningkat an kualitas tata kelola penyelenggara an pemer intahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkat an kinerja p enyelenggara an pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	100 %	370.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

27

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Alnbut Kelengkapan	120 Paket			40 Paket	14.500.000,00	Kota Padang Pangang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pertukangan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	40 Paket	80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	112 Orang			40 Orang	53.832.800,00	Kota Padang Pangang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pertukangan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	41 Orang	120.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

21

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang			0 Orang	0,00	Kota Padang Pangjang, Semua Kecamatan, Somua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang ber bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	0 Orang	170.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Dilaksanakan	100%			100 %	265.088.500,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Tran sformasi Pelayanan Publik	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang ber bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pemer intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	100%	442.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

27

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	3 108.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	1 Paket	15 000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Ponyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	10 000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	1 Paket	90.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Ponyediaan Bahan Logistik Kantor														

27

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	39.790.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	1 Paket	40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket			2 Paket	24.999.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	2 Paket	32.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

27

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	15 Laporan			1 Laporan	9.996.000,00	Kota Padang Pangjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kinerja penyolongan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	5 Laporan	15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 01 2 08 0009		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480 Laporan			150 Laporan	177.175.000,00	Kota Padang Pangjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyolongan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyolongan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	130 Laporan	250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

27

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan BMD yang Tuntas Dilaksanakan	100 %			100 %	55.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	0 %	400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit			0 Unit	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	1 Unit	200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

27

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit			2 Unit	55 000 000,00	Kota Padang Parang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertu Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkat an kualitas tata kelola penyeleng garan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkat an kinerja p enyelengga ran pemor intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	0 Unit	200 000 000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan	100 %			80 %	263 010 800,00			Mempertu Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkat an kualitas tata kelola penyeleng garan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkat an kinerja p enyelengga ran pem intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	90 %	307 000 000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	5 01 01 2 08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

21

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan			1 Laporan	2.000.000,00	Kota Padang Pangang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	1 Laporan	2.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	25.046.000,00	Kota Padang Pangang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

27

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	235.964.800,00	Kota Padang Pangaj, Somua Kecamatan, Somua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	1 Laporan	275 000 000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan yang Tuntas Dilaksanakan	100%			100 %	190.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	100%	450 000 000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

27

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit			8 Unit	95.000.000,00	Kota Padang Pangjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	8 Unit	175.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0002		Ponyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			1 Unit	30.000.000,00	Kota Padang Pangjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	1 Unit	35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel														

27

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit			5 Unit	5.000.000,00	Kota Padang Pangang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pem intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	0 Unit	30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit			20 Unit	10.000.000,00	Kota Padang Pangang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelengga raan pem intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	10 Unit	60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

27

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kota penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	1 Unit	150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	85%			88 %	380.604.060,00						80%	680.000.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditan	80%			70 %	335.327.760,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kota penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	75%	580.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

27

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	18 Laporan			6 Laporan	50.050.000,00	Kota Padang Pangang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	6 Laporan	60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	375 Laporan			120 Laporan	215.917.760,00	Kota Padang Pangang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	125 Laporan	330.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0003		Revisi Laporan Kinerja														

27

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan			2 Laporan	19.870.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	2 Laporan	40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Kerja Sama Pengawasan Internal														

27

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5 Kesepakatan			0 Kesepakatan	0,00	Kota Padang Pangang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggara n pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelenggara n pem intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	2 Kesepakatan	60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
B.01.02.2.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemoniksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemoniksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemoniksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemoniksaan APIP	13 Dokumen			3 Dokumen	34.490.000,00	Kota Padang Pangang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a Stabilitas Politik dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Meningkatk an kualitas tata kelola penyelenggara n pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatk an kinerja p enyelenggara n pem intahan daerah yang BerA KHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	6 Dokumen	60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

21

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan	100 %			100 %	45.276.300,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	100 %	100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan			1 Laporan	2.478.300,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														

27

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	18 Laporan			6 Laporan	42.800.000,00	Kota Padang Pariang, Sumua Kecamatan, Sumua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pertukaran Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	6 Laporan	70.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	93%			91 %	134.042.800,00						92%	500.000.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pendampingan dan Asistansi yang tuntas dilakukan	75%			50 %	10.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Pertukaran Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Ber orientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	50%	30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														

27

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi			1 Rekomendasi	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertukarkan Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	1 Rekomendasi	30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan	90%			87 %	124.042.800,00			Mempertukarkan Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	88%	470.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Ususan Pemerintahan Daerah														

R 21

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Ditakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	69 perangkat daerah			23 perangkat daerah	40.880.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	23 perangkat daerah	75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Ditakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	69 perangkat daerah			23 perangkat daerah	10.700.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	23 perangkat daerah	40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

27

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan			3 Kegiatan	55.430.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	2 Kegiatan	265.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas															
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	69 perangkat daerah			23 perangkat daerah	16.932.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	23 perangkat daerah	90.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
		J U M L A H							5.482.565.960,00							8.149.000.000,00	

21

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini juga berdasarkan pada rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk tahun 2018–2023 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang dengan memperhatikan usulan dan prioritas pembangunan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan dengan mempedomani tema dan prioritas pembangunan tahun 2023 di Kota Padang Panjang.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka peran dan fungsi Inspektorat sesungguhnya ada disana, dimana Inspektorat harus mampu memastikan bahwa seluruh pemilik kepentingan dan stakeholder pada Pemerintah Kota Padang Panjang telah melaksanakan system pengendalian yang memadai pada setiap program dan kegiatan sehingga. Pemerintah Kota Padang Panjang juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sehingga setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sudah dapat melakukan inventarisasi dan pengendalian risiko yang memadai sehingga risiko dapat dikelola dengan baik yang pada akhirnya tidak akan menjadi penghambat tujuan organisasi.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022, prediksi tahun 2024 dan Rencana Pembangunan serta Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Daerah Padang Panjang tahun 2024.

Padang Panjang, Agustus 2023

Inspektur, 



Dr. SYAHRIL, SH, MH, CGCAE.

NIP. 19700405 199703 1 004





PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH, KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	14
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat	48
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	49
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	50
3.3 Program dan Kegiatan	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	68
BAB V PENUTUP	90

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka penyusunan Renja OPD didasarkan pada aspirasi masyarakat yang diakomodir melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik juga harus menyusun Rencana Kerja tersebut untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 serta Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sehingga penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik dan RPD Kota Padang Panjang 2024-2026, dalam rangka melaksanakan rencana yang telah dirumuskan melalui kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan Disamping itu Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan salah satu unsur penunjang Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang serta bertugas dan berfungsi membantu Kepala Daerah dalam hal masalah memberi pelayanan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana yaitu: saat pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik, berkewajiban untuk menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 disusun secara sistematis dan analisis dengan memperhatikan isu serta perkembangan kondisi terkini penyusunan rencana pembangunan, terutama sekali dalam rangka pencapaian target pembangunan lima tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Secara legalitas formal, penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2022 Dasar hukum yang digunakan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
23. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2002 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Provinsi Sumatera Barat;
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang;
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Padang Panjang;
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
28. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
29. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik ini adalah untuk :



1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024.
2. Sebagai salah satu dokumen acuan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan
- BAB II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu yang terdiri dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik *Analisis Kinerja Pelayanan* Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Hasil Musrenbang).
- BAB III : Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan, yang terdiri dari Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Program dan Kegiatan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa
dan Politik.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa
dan Politik

BAB V : Penutup



BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2023 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang tahun lalu, dan Realisasi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau realisasi APBD untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tahun pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Tahun 2022 pada umumnya terlaksana 100%, semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan memenuhi target hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi semua Sub Kegiatan di atas 60%.

Adapun evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dan capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik dapat digambarkan pada table 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023
Kota Padang Panjang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan SKPD tahun 2021		Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022)		Perkiraan berjalan Realisasi Capaian Target SKPD s/d Tahun 2021
							Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Keluaran Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	
1	2		3	4		5	6	7	8	9	10
	URUSAN WAJIB										
1		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ASN	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	32 org	29 org	29 org	29 org	100%			
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang di susun								
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah rapat koordinasi	35 kali	35 kali	35 kali	35 kali	100%		35 kali	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disusun								
		Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Tenaga Jumlah Laporan Prognosis yang di susun	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100%		2 Orang	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
		Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang di sediakan	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100%		8 Jenis	

Handwritten signature/initials

1			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah /jenis bahan logistik kantor yang disediakan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%		3 jenis	
1			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah/jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%		2 jenis	-
1			Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan rapat-rapat								
				Jumlah orang/kali makanan dan minuman rapat yang disediakan	700 org /kali	700 org /kali	700 org /kali	700 org /kali	100%		700 org /kali	
			Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan urusan penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
			Pengadaan Pakan Dinas Beserta Perlengkapannya									
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%		8 Unit	
			Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa penunjang Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		100%	-
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%		1 Jenis	-
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%		12 laporan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum kantor	Jumlah THL, jumlah Gedung yang dibersihkan	2 org	2 org	2 org	2 org	100%		2 org	-
			Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Persentase Capaian pemeliharaan barang milik daerah	100	100	100	100	100%		100	-

Handwritten signature/initials

			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, pajak kendaraan, perorangan dinas. Atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	100%		20 unit	
			Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33 unit	33 unit	33 unit	33 unit	100%		33 unit	
			Sub kegiatan pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100%		1 gedung	
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Bencana yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
			Penyusunan kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	-	-	-	-	-		-	
			Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis Bencana)	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi Komunikasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap Muka kepada Penduduk yang tinggal di daerah Rawan Bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kasawan Tempat Tinggal	-	-	-	-	-		-	
			Sub Kegiatan Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah anggota pusdalops yang melaksanakan operasional	22 org	22 org	22 org	22 org	22 org		22 org	
			Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Jumlah Peserta Jambore Tk Provinsi	50 kasus	50 kasus	-	-	-	%	-	

Handwritten signature/initials

1			Program pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial Dan Budaya	Jumlah forum koordinasi yang dilaksanakan dan Pertemuan Akbar	7 kali 50 org	3 kali	7 kali	7 kali	100%	%	7 kali	
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya	Jumlah partai peserta pemilu yang dibina	9 parpol	8 parpol	8 parpol	8 parpol	85%	%	8 parpol	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayatan Kepercayaan Di Daerah	Jumlah tim terpadu dan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	55 ormas	55 ormas	55 ormas	55 ormas	85%	%	55 ormas	
			Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula	Jumlah Peserta sosialisasi yang pemilih yang pemula	-	-	-	-	-	%	-	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah peserta sosialisasi Perundang-undangan	-	-	-	-	-	%	-	
1	35		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	Presentase Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik Di Daerah	Jumlah pertemuan Pelaksanaan Koordinasi Di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik Di Daerah	5 kali , 6 kali	5 kali , 6 kali	5 kali , 6 kali	5 kali , 6 kali	100%		5 kali , 6 kali	



			Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Peserta Jambore Tk Provinsi dilaksanakan	40 orang	75 orang	-	-	-	%	-	-
			Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penanganan konflik sosial di Kota Padang Panjang. Jumlah Peningkatan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu Kada	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
			Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah peserta penyuluhan P4GN	50 orang	50 orang	-	-	-	%	-	-
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah kader wawasan kebangsaan yang di latih	60 orang		-	-	-	%	-	-
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi fasilitasi kelembagaan kegiatan perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Jumlah pertemuan FKUB yang di adakan	6 pertemuan	2 pertemuan	3 pertemuan	3 pertemuan	50%	%	3 pertemuan	-
			Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah. Serta pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang asing/LSM yang di awasi	11 orang/ LSM	11 orang/ LSM	11 orang/ LSM	11 orang/ LSM	85%	%	11 orang/ LSM	-
			Sub kegiatan pelaksanaan Koordinasi di bidang pendidikan politik etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah. Serta pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase konflik sosial yang tertangani	90%	90%	90%	80%	10%	%	90%	-

h f

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan politik sesuai Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan politik merupakan hal mutlak yang harus menjadi perhatian dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang penanggulangan bencana maupun di bidang kesatuan bangsa dan politik, sehingga proses penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Di bidang penanggulangan bencana, telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari pra bencana, saat terjadinya bencana dan pasca bencana.

Pada tahap pra bencana telah dilaksanakan beberapa kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan. Penyiapan produk hukum daerah dibidang penanggulangan bencana, pembenahan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik dan pembentukan satuan tugas (satgas) penanggulan bencana sebagai ujung tombak dalam penanganan bencana merupakan prioritas yang sedang dilaksanakan dan terus ditingkatkan untuk masa yang akan datang. Sampai tahun 2019, kegiatan tahun 2019 telah dibentuk 160 satgas penanggulangan bencana pada seluruh kelurahan di Kota Padang Panjang, bahkan di tingkat Kota Padang Panjang telah dibentuk Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) penanggulangan bencana dan Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik. Satgas yang dibentuk tersebut, keberadaannya diharapkan dapat memperlancar penanggulangan bencana secara terpadu dan terkoordinir.

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, penanggulangan bencana secara bertahap telah dilaksanakan, sasaran seluruh masyarakat di 16 Kelurahan di Kota Padang Panjang, dengan harapan masyarakat Kota Padang Panjang memiliki kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pada tahap tanggap darurat, mengacu pada bencana yang pernah terjadi di Kota Padang Panjang, seperti kebakaran, angin ribut (pohon tumbang), longsor dan banjir yang telah dilaksanakan kegiatan penanganan terhadap bencana tersebut, mulai dari melakukan pengkajian cepat terhadap dampak dari bencana yang terjadi, penetapan status tanggap darurat untuk memudahkan dalam penyelamatan dan evakuasi dari korban bencana sampai kepada pemenuhan kebutuhan dasar dan menyediakan tempat penampungan sementara bagi korban bencana tersebut.

Pada tahap pasca bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik memberi rekomendasi untuk masyarakat di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bangunan dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana.

Di bidang kesatuan bangsa dan politik, telah dilaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya minuman keras dan narkoba, wawasan kebangsaan, menciptakan stabilitas politik yang kondusif serta mewujudkan kondisi yang damai, aman, nyaman dan tertib di tengah-tengah masyarakat. Pembinaan terhadap partai politik dan organisasi kemasyarakatan telah dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan serta penyampaian informasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik dan organisasi kemasyarakatan tersebut.

Untuk mewujudkan Fungsi-fungsi tersebut, maka dalam penyusunan anggaran terdapat beberapa prinsip disiplin yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD
3. Pelaksanaan anggaran, dimana semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD Kota Padang Panjang

Beberapa aspek tersebut diatas dirinci dalam tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi					Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
01	Kelurahan Tangguh Bencana			2 Kelurahan	8 Kelurahan	12 Kelurahan	14 Kelurahan	16 Kelurahan	2 Kelurahan	-	0		-	2 Kelurahan	0	-	-		
02	Jumlah upaya mitigasi yang dilakukan			4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	0	0		-	4 kali	0	-	-		
03	Jumlah peserta jambore pengurangan risiko bencana			15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	0	0		-	15 orang	0	-	-		Jambore Tingkat Provinsi
04	Jumlah masyarakat yang di latih dan aparat			160 orang	160 orang	160 orang	160 orang	160 orang	160 orang	0	0		-	160 orang	0	-	-		
05	Jumlah orang yang mendapat mengikuti simulasi PB				100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	0	0	0		-		0	-	-		
06	Respon time Tanggap Darurat			10 menit	9 menit	8 menit	7 menit	6 menit	10 menit	9 menit	8 menit	-	-	18 menit	17 menit	-	-	-	
07	Jumlah anggota pusdalops yang melaksanakan operasional			22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	-	-	22 orang	22 orang	-	-		
08	Jumlah kasus yang tangani			100 kasus	95 kasus	90 kasus	85 kasus	80 kasus	100 kasus	95 kasus	78 Kejadian	-	-	100 kasus	95 kasus	-	-		
09	Jumlah/jenis sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam yang diadakan			20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	0	-	-	20 jenis	20 jenis	-	-		
10	Lama waktu pendistribusian logistik			170 menit	160 menit	155 menit	150 menit	145 menit	170 menit	160 menit	155 menit	-	-	170 menit	160 menit	155 menit	-		
11	Lama waktu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana			48 jam	45 jam	42 jam	39 jam	36 jam	48 jam	45 jam	42 jam	-	-	48 jam	0	0	-		

12	Jumlah kerusakan yang di verifikasi		50 kasus	48 kasus	46 kasus	44 kasus	42 kasus	50 kasus	48 kasus	7 kasus		-	50 kasus	0	0	-		
13	Jumlah dokumen yang di susun , Jumlah anggota tim yang dilatih, pembinaan yang dilaksanakan		1 dokumen, 40 orang, 1 kali	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	1 dokumen	-	-	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	0	0	-	-	
14	Persentase penanganan konflik sosial di kelurahan		60%	70%	75%	80%	85%	60%	70%	75%-	-	-	60%	70%	75%	-	-	
15	Jumlah Peningkatan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda		50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	60 orang	0	0	-	-	60 orang	0	-	-	-	
16	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu Kada		Pemilu serentak 71%	Pilgub 56%				Pilkada 73%	Pemilu serentak 81%	53.66%	0	-	-	Pemilu serentak 81%	53.66%	-	-	
17	Jumlah peserta penyuluhan P4GN		90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	50 orang	0	0	-	-	50 orang	0	-	-	-	Refocusing anggaran
18	Jumlah komunitas intelijen daerah (Kominda) yang dilaksanakan		12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	0	0	0	-	-	0	-	-	-	-	Kominda 2019 Telah dihapus sesuai dengan ...
19	Jumlah kader wawasan kebangsaan yang di latih		50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	60 orang	0	0	-	-	50 orang	0	-	-	-	
20	Jumlah pertemuan FKUB yang di tangani		6 pertemuan	6 pertemuan	6 pertemuan	6 pertemuan	6 pertemuan	6 pertemuan	3 Pertemuan	3 Pertemuan	-	-	6 pertemuan	3 pertemuan	-	-	-	
21	Jumlah orang asing/LSM yang di awasi		11 orang/ LSM	11 orang/ LSM	11 orang/ LSM	11 orang/ LSM	11 orang/ LSM	11 orang/ LSM	11 orang/ LSM	11 orang/ LSM	-	-	11 orang/ LSM	11 orang/ LSM	-	-	-	
22	Persentase konflik sosial yang tertangani		60%	70%	75%	80%	85%	85%	70%	75%		-	60%	70%	-	-		

f/

23	Jumlah forum koordinasi yang dilaksanakan dan Pertemuan Akbar		7 kali pertemuan	7 kali pertemuan	7 kali pertemuan	7 kali pertemuan	7 kali pertemuan	7 kali pertemuan	7 kali pertemuan	10 kali pertemuan	-	-	1 angkatan 50 org	7 kali pertemuan	-	-		
24	Jumlah tim terpadu dan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan		55 ormas	55 ormas	55 ormas	55 ormas	55 ormas	55 ormas	55 ormas	55 ormas	-	-	55 ormas	55 ormas	-	-	-	
25	Jumlah pemilih yang dididik		100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	0	0	-	-	100 orang	0	-	-	-	
26	Jumlah partai peserta pemilu yang dibina		14 parpol	14 parpol	14 parpol	14 parpol	14 parpol	8 parpol	8 parpol	8 parpol	-	-	8 parpol	8 parpol	-	-	-	
27	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan		200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	50 orang	0	0	-	-	50 orang	0	-	-	-	Di Anggaran Cuma 50 Orang karena evesiensi anggaran
28	Lama pemantauan pelaksanaan pilpres, walpres dan legislatif		3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	0	0	-	3 bulan	3 bulan	-	-	-	

R /

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. **Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik**
Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Bencana maupun dalam fungsinya sebagai Pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, sampai tahun 2022 ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik telah banyak peningkatan dan berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, walaupun belum sempurna yang di inginkan, karna masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas, khususnya peralatan dalam penanggulangan bencana.
2. **Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik**

Dalam pelaksanaan pelayanan dan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik masih menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan untuk menjalankan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas, khususnya peralatan dalam penanggulangan bencana. Belum tersedianya Kantor yang Representatif serta belum lengkapnya peralatan penanggulangan bencana: Escapator mini untuk Penanggulangan Bencana tanah longsor, banjir, serta alat komunikasi Radio dan HT.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. karena terbatasnya pendanaan tentang pelatihan/diklat bagi masyarakat Kelurahan, untuk itu perlu dilakukan Pendidikan dan pelatihan tentang resiko Pengurangan Bencana serta pembentukan kelompok Siaga Bencana yang belum terbentuk untuk menuju Kelurahan Tangguh Bencana.
3. Masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menjaga stabilitas daerah di kota Padang Panjang, yang mana pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dalam rangka meningkatkan Stabilitas daerah Tahun 2020 telah mencapai target, dimana dari 10 (sepuluh) kali di anggarkan, terlaksana sebanyak 9 (sembilan) kali.

3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Beberapa faktor internal yang dimiliki, setelah dilakukan analisis sangat mendukung pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan harus dimanfaatkan secara baik. Faktor internal tersebut berupa kekuatan yang ada pada organisasi dengan tugas pokok dan fungsi yang mendukung dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana dan pelayanan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas, ketersediaan anggaran dan semangat aparatur yang dimiliki termasuk faktor-faktor yang perlu diperhatikan.

Disamping kekuatan yang dimiliki, masih banyak kelemahan yang perlu dibenahi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Diadakan kegiatan-kegiatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Melalui Jambore Pengurangan Resiko Bencana, dan untuk menjaga Stabilitas Daerah Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dan untuk menjaga Stabilitas Daerah tentang Pemantauan Pemilihan Umum, dan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba (P4GN) Penelitian Bantuan Keuangan Partai.

Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, tingginya partisipasi relawan dalam penanggulangan bencana dan terjalinnya kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam penanganan bencana, merupakan peluang eksternal yang perlu dimanfaatkan dalam strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik. Di samping itu, berbagai ancaman eksternal juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik. masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana, masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, sertasemakin meningkatnya peran masyarakat dalam kehidupan politik, ditandai dengan menjamurnya Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkeinginan untuk mengawasi/peduli semua aktifitas yang ada di Kota Padang Panjang

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tindak lanjut dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik selama periode sebelumnya maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam

menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama tiga tahun kedepan (2024-2026) adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan Kelurahan Tangguh Bencana
2. Respon time Tanggap Darurat dan Pendistribusian Logistik saat kejadian bencana
3. Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana berskala kecil
4. Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Penanganan Konflik Sosial di Kota Padang Panjang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 ini agar bisa berjalan lancar tentu harus mendapat dukungan anggaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik . Untuk melihat perbandingan rancangan awal RKPD 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun anggaran 2024 dapat dilihat dalam table 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Padang Panjang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJA NG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA		Persentase Realisasi Urusan Pemerintah an pada Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik			PROGRAM PENUNJA NG URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA		Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulan gan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik			
	Administra si Keuangan		Persentase pemenuhan layanan			Administra si Keuangan		Persentase pemenuhan layanan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
	Perangkat Daerah		adminstrasi keuangan perangkat daerah			Perangkat Daerah		adminstrasi keuangan perangkat daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya	518 orang/bulan	3.754.786.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah ASN yang dibayarkan gajinya	518 orang/bulan	3.754.786.000	
	Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah				24.000.000	Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah					
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Paket		24.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		35 Paket		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
	Administra si Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah			Administra si Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.994.150	Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.892.500	Penyediaa n Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		
	Penyediaan Barang	Kota Padang	Jumlah Paket Barang	1 Paket	10.399.900	Penyediaa n Barang	Kota Padang	Jumlah Paket Barang	1 Paket		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
	Cetakan dan Penggandaan	Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			Cetakan dan Penggandaan	Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	64.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen		

PA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	2 Unit	41.500.000	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	2 Unit	41.500.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		22.500.000	
	Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang terpenuhi	90 Perse n	160.733.600	Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		158.060.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.500.000	Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		30.000.000	Penyediaa n Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		30.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		127.233.600	Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		124.560.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 Persen	367.381.118	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 Persen	367.381.118	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	316.456.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	316.456.800	
	Pemeliharaan Peralatan	Kota Padang Panjang, Semua	Jumlah Peralatan dan Mesin	35 Unit	36.707.500	Pemeliharaan Peralatan	Kota Padang Panjang, Semua	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	35 Unit	35.632.488	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	dan Mesin Lainnya	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lainnya yang Dipelihara			dan Mesin Lainnya	Kecamatan, Semua Kel/Desa	yang Dipelihara			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit gedung	15.291.830	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit gedung	15.291.830	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	300.000.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	300.000.000	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		persentase warga yang mendapat pelayanan informasi	100 Persen	300.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		persentase warga yang mendapat pelayanan informasi	100 Persen	300.000.000	

f /

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
	Kabupaten/ Kota		rawan bencana			Kabupaten /Kota		rawan bencana			
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	260.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	260.000.000	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi	40 Orang	40.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai	40 Orang	40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
			sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun					jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		persentase kesiapan masyarakat terhadap risiko bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		persentase kesiapan masyarakat terhadap risiko bencana			
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai	10 Unit	100.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman	10 Unit	50.000.000	

PA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
			dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya					bencana di kawasan tempat tinggalnya			
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	44.298.350	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	44.298.350	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan	12 Dokumen	1.015.550.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai	12 Dokumen	1.015.550.000	

f /

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
	Kabupaten/ Kota		legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya			Kabupaten/ Kota		dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya			
	Pelayanan Penyelama tan dan Evakuasi Korban Bencana		presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiaga an terhadap bencana	100 Perse n	100.000.000	Pelayanan Penyelama tan dan Evakuasi Korban Bencana		presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiaga an terhadap bencana	100 Perse n	108.405.000	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan kejadian penyelemata n dan evakuasi korban bencana yang ditangani	90 Lapor an	100.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan kejadian penyelematan dan evakuasi korban bencana yang ditangani	90 Lapora n	108.405.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
	Penataan Sistem Dasar Penanggul angan Bencana		Persentase jumlah kerusakan yang tertangani	100 Perse n	71.582.500	Penataan Sistem Dasar Penanggul angan Bencana		Persentase jumlah kerusakan yang tertangani	100 Perse n	71.582.500	
	Koordinasi penangana n Pascabenc ana Kabupaten/ Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencan a di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencan a (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiat an	71.582.500	Koordinasi penangana n Pascabenc ana Kabupaten/ Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiat an	71.582.500	
	PROGRAM PENGUAT AN IDEOLOGI PANCASIL		Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila	80 Perse n	580.000.000	PROGRAM PENGUAT AN IDEOLOGI PANCASIL		Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan	80 Perse n	724.939.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
	A DAN KARAKTER KEBANGSAAN		dan Karakter Kebangsaan			A DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Karakter Kebangsaan			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		presentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu-isu di daerah	80 Perse n	580.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		presentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu-isu di daerah	80 Perse n	724.939.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan	70 Orang	580.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,	80 Orang	724.939.000	- Kenaikan indeks pakaian paskibra ka

f *A*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
	Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaa n, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaa n		Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaa n, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaa n		Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA		Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	100 Perse n	9.513.957.430	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA		Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	100 Perse n	8.890.816.630	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
	SERTA BUDAYA POLITIK					SERTA BUDAYA POLITIK					
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapa n Pelaksanaa n Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkata n Demokrasi, Fasilitasi Kelembaga an Pemerinta han, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pe		presentase pencegahan terhadap perkembang an politik di daerah yang tidak sesuaidenga n etika dan budaya	23 Perse n	9.513.957.430	Perumusa n Kebijakan Teknis dan Pemantap an Pelaksana an Bidang Pendidika n Politik, Etika Budaya Politik, Peningkat an Demokrasi , Fasilitasi Kelembag aan Pemerinta han, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan		presentase pencegahan terhadap perkembanga n politik di daerah yang tidak sesuaidengan etika dan budaya	23 Perse n	8.890.816.630	

Handwritten signature/initials

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
	milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau n Situasi Politik					Umum/Pe milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau an Situasi Politik					
	Pelaksanaa n Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkata n Demokrasi, Fasilitasi Kelembaga an Pemerintah an, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa n Pemerintaha n, Perwakilan dan Partai Politik,	45 Orang	8.814.464.050	Pelaksanaa n Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkata n Demokrasi, Fasilitasi Kelembaga an Pemerintah an, Perwakilan dan Partai Politik,	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum	45 Orang	8.199.999.950	- Hibah TNI/POL RI (PILKAD A), Hibah KPU Bawaslu .

f

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
	Umum/Pem ilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau n Situasi Politik di Daerah		Pemilihan Umum/Pemili han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Pemilihan Umum/Pe milihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau n Situasi Politik di Daerah		Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	Pelaksanaa n Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkata n Demokrasi, Fasilitasi Kelembaga an Pemerintaha n, Perwakilan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa n Pemerintaha n, Perwakilan dan Partai	15 Orang	699.493.380	Pelaksanaa n Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkata n Demokrasi, Fasilitasi Kelembaga an Pemerintah an,	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih	15 Orang	690.816.680	

f /

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
	dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku	100 Persen	181.783.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku	100 Persen	56.832.150	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan		Jumlah organisasi masyarakat	55 organisasi	181.783.500	Perumusan Kebijakan		Jumlah organisasi masyarakat	55 organisasi	56.832.150	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		yang diberdayakan dan diawasi	masyarakat		Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		yang diberdayakan dan diawasi	masyarakat		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	14 Orang	181.783.500	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	14 Orang	56.832.150	

ff

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
			Ormas Asing di Daerah			Asing di Daerah		Ormas Asing di Daerah			
	PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGEMB ANGAN KETAHAN AN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Konflik yang tertangani	100 Perse n	649.545.700	PROGRAM PEMBINA AN DAN PENGEMB ANGAN KETAHAN AN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Konflik yang tertangani	100 Perse n	177.525.700	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapa n Pelaksanaa n Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		presentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya dikalangan masyarakat	100 Perse n	649.545.700	Perumusa n Kebijakan Teknis dan Pemantap an Pelaksana an Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		presentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya dikalangan masyarakat	100 Perse n	177.525.700	

f f

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
	Pelaksanaa n Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegaha n Penyalagun aan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercaya an di Daerah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalaguna an Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		649.545.700	Pelaksanaa n Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegaha n Penyalagu naan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercaya an di Daerah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaa n Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		177.525.700	
	PROGRAM PENINGKAT AN KEWASPA DAAN		Persentase kewaspadaa n nasional yang	100 Perse n	663.646.950	PROGRAM PENINGK ATAN KEWASPA DAAN		Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah	100 Perse n	682.988.950	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
	NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		tertangani di daerah			NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS I PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanfaatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		presentase pencegahan konflik sosial yang berkembang ditengah masyarakat	100 Perse n	663.646.950	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanfaatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		presentase pencegahan konflik sosial yang berkembang ditengah masyarakat	100 Perse n	682.988.950	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capai an	Pagu Indikatif	
	Pelaksanaa n Kebijakan di Bidang Kewaspada an Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantau n Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspada an Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembaga an Bidang Kewaspada an, serta Penangana n Konflik di Daerah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaa n Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaa n Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaa n Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah	59 Orang	663.646.950	Pelaksanaa n Kebijakan di Bidang Kewaspada an Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantau n Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspada an Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembaga an Bidang Kewaspada an, serta Penangana n Konflik di Daerah	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	59 Orang	682.988.950	



2.5 Penelahaan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang dalam menyusun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 telah berupaya menyaring dan menalaah usulan-usulan dari masyarakat yang diajukan dalam pelaksanaan musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) baik ditingkat Kelurahan maupun ditingkat kecamatan.

Usulan-usulan yang disampaikan masyarakat, sepanjang berkaitan dengan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku akan diakomodir dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun berjalan maupun pelaksanaan tahun berikutnya.

Untuk Tahun Anggaran 2024, tidak ada usulan program atau kegiatan dari kelompok Masyarakat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik.



BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Kota Padang Panjang masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023.

Sehubungan dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, untuk menjamin kepastian hukum dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dan meninjaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB), perlu dilakukan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang ditetapkan oleh Walikota. RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sesuai Rancangan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) Tahun.

RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam menetapkan sasaran pembangunan, strategis dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama 4 (empat) tahun agar mekanisme perencanaan dan Pembangunan Daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah dan
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, Renstra dan Renja.

RPD Tahun 2024-2026 dijadikan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja Pemerintah Daerah pada masa RPD Tahun 2024-2026 berakhir. RPD Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026. Dan dituangkan lebih lanjut dalam RKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Renstra Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026, yang selanjutnya di sebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun .

Selain itu, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 di dasarkan pada Visi misi RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan Daerah kota Padang Panjang 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan renncana Strategis perangkat Daerah disamping memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik

Adapun tujuan dan sasaran dari renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut;

A. TUJUAN

Tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Padang Panjang yang tangguh terhadap bencana dimaksudkan adalah bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Padang Panjang siap, tanggap dalam menghadapi bencana dan memiliki kesadaran terhadap resiko bencana, meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan dan terselenggaranya penanggulangan bencana, yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel;
2. Padang Panjang dengan stabilitas politik yang terkedali dimaksudkan adalah terciptanya kondisi daerah yang kondusif dengan berperannya seluruh elemen masyarakat.



B. SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu.
- 2. Terwujudnya pengutan regulasi dan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.
- 3. Mewujudkan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap resiko bencana.
- 4. Mewujudkan stabilitas politik daerah yang kondusif dengan peran serta seluruh elemen.

Tujuan Renja Tahun 2024 adalah untuk menetapkan Prioritas Pembangunan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan politik Kota Padang Panjang Tahun 2024 berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi pada tahun 2024.

Adapun Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun berdasarkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang di atur dalam UU Tahun 2014, sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sesuai Permendagri 18 Tahun 2020. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik 3 urusan yang mendukung IKK Kota, lihat dalam tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Rumus	Target 2022	Sumber Data	OPD
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik

	a. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	60.137 jiwa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	
	b. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	60.137 jiwa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	
	c. Jumlah warga negara yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi korban bencana	153 jiwa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.3 Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Padang Panjang, pada dasarnya kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai SKPD pendukung dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan Misi Kota

f k

Padang Panjang, maka program dan kegiatan yang direncanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 terdiri dari:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Mebel
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Penanggulangan Bencana
 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 - Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per Jenis Bencana)
 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Penyediaan Peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- Pelatihan dan Mitigasi Bencana kabupaten/Kota
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- 3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - Penanganan Pascabencana kabupaten/Kota
- 4. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- C. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 1. Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter bangsa
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaharuan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan sejarah Kebangsaan
- D. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
 1. Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- E. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 1. Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas Asing di Daerah
- F. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 1. Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah

G. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

1. Perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan politik Kota Padang Panjang tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini :

TABEL 3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU 2025

KOTA PADANG PANJANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK				16,669,622,748					8,731,173,395
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				6,136,520,318					6,882,339,395
1 0501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik		100 Persen	4,578,231,268			Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	90 Persen	4,431,459,395
1 0501 2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	3,754,786,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	3,399,738,642
1 0501 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	518 orang/bulan	3,754,786,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 orang/bulan	3,399,738,642
1 0501 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	24,000,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	33,150,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 05 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	35 Paket	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan	35 paket	33,150,000
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah		90 Persen	211,286,550			Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 Persen	367,873,900
1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	1 Paket	4,994,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	4 Paket	5,805,600
1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	1 Paket	45,892,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	45,892,500
1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	2 Paket	10,399,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15,494,750
1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	150 Laporan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	34 Laporan	300,681,050
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 Persen	64,000,000			Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	80,000,000
1 05 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	1 Unit	41,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	30,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Umum				
1 05 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	1 Unit	22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	50,000,000
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		90 Persen	156,777,600			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 Persen	178,856,100
1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	3 Laporan	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3,500,000
1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	28,924,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	34,998,500
1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	4 Laporan	124,353,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	140,357,600
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		90 Persen	367,381,118			Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 Persen	371,840,753

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 05 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	316,456,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	339,238,800
1 05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	1 Unit	35,632,488	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	17,310,133
1 05 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	1 Unit	15,291,830	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15,291,820
1 05 03	PROGRAM PENANGGULAN GANBENCANA	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100 Persen	1,558,289,050			Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	1,288,440,000
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	persentase warga yang mendapat pelayanan informasi rawan bencana		100 Persen	300,000,000			persentase warga yang mendapat pelayanan informasi rawan bencana	100 Persen	50,000,000
1 05 03 2.01 0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	260,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan	- Dokumen	-

f

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 05 03 2.01 0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160 Orang	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	160 Orang	50,000,000
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persentase kesiapan masyarakat terhadap risiko bencana		5 Persen	1,054,936,550			persentase kesiapan masyarakat terhadap risiko bencana	10 Persen	1,112,440,000
1 05 03 2.02 0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105 Unit	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di	105 Unit	30,000,000
1 05 03 2.02 0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 orang	44,298,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi	175 Orang	120,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 05 03 2.02 0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	960,638,200 ✓	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat	12 Dokumen	872,440,000
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100 Persen	131,770,000 ✓			presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	90,000,000
1 05 03 2.03 0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	131,770,000 ✓	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji	1 Dokumen	90,000,000
		Jumlah laporan kejadian penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang		90 Laporan				Jumlah laporan kejadian penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang	85 orang	
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah kerusakan yang tanggani		100 Persen	71,582,500 ✓					

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 05 03 2.04 0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	71,582,500					
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				10,533,102,430					1,848,834,000
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		80 Persen	724,939,000			Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80 Persen	605,000,000
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	presentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologiradikal dan isu-isu di daerah		80 Persen	724,939,000			presentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang Ideologi radikal dan isu-isu di daerah	80 Persen	605,000,000
8 01 02 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang IdeologiW awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Orang	724,939,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Pakaian PASKIBR AKA	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang IdeologiW awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	80 Orang	605,000,000

fp

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah		100 Persen	8,890,816,630 ✓			Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	100 Persen	1,003,084,000
8 01 03 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	presentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuaidengan etika dan budaya		23 Persen	8,890,816,630 ✓			presentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuaidengan etikadan budaya	23 Persen	1,003,084,000

f ↗

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8 01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Orang	8,199,999,950 ✓	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Hibah TNI/POLRI - Hibah KPU - Hibah BAWASLU	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	45 Orang	600,000,000
8 01 03 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang	690,816,680 ✓	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Hibah Partai Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	15 Orang	403,084,000

f →

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku		100 Persen	56,832,150 ✓			Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku	100 Persen	50,000,000
8 01 04 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi masyarakat yang diberdayakan dan diawasi		55 organisasi masyarakat	56,832,150 ✓			Jumlah organisasi masyarakat yang diberdayakan dan diawasi	55 organisasi masyarakat	50,000,000
8 01 04 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Orang	56,832,150 ✓	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	14 Orang	50,000,000
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Konflik yang tertangani		100 Persen	177,525,700 ✓			Persentase Konflik yang tertangani	100 Persen	135,000,000

fr

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8 01 05 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	presentase pencegahan potensi konflik akibat gejala ekonomi, masalah sosial dan budaya dikalangan masyarakat		100 Persen	177,525,700 ✓			presentase pencegahan potensi konflik akibat gejala ekonomi, masalah sosial dan budaya dikalangan masyarakat	100 Persen	135,000,000
8 01 05 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43 Orang	177,525,700 ✓	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	43 Orang	135,000,000

8	01	06				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah		100 Persen	682,988,950				Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah	100 Persen	55,750,000
8	01	06	2.0	1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	presentase pencegahan konflik sosial yang berkembang ditengah masyarakat		100 Persen	682,988,950				presentase pencegahan konflik sosial yang berkembang ditengah masyarakat	100 Persen	55,750,000
8	01	06	2.01	0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59 Orang	682,988,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	59 Orang	55,750,000	

f 4

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDAAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang dapat dilihat pada table 4.1 dibawah:



TABEL 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggungan Jawab
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK			16,669,622,748							8,731,173,395
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
105		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6,136,520,318							6,882,339,395
10501		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan	100 Persen	4,578,231,268					90 Persen		4,431,459,395
105012.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	3,754,786,000					100 Persen		3,399,738,642
105012.020001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 518 orang/bulan	3,754,786,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		518 orang/bulan		3,399,738,642



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
105012.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 Persen	24,000,000					100 Persen		33,150,000
105012.050002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Paket	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		35 paket		33,150,000
105012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		90 Persen	211,286,550					90 Persen		367,873,900

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 05 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	4,994,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		4 Paket		5,805,600
1 05 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	45,892,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK,		4 Paket		45,892,500

f 

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
105012060005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	10,399,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		12 Paket		15,494,750



Kode				Urusan / Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun gJawab	
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Laporan	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		34 Laporan		300,681,050
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 Persen	64,000,000					100 Persen		80,000,000

Handwritten signature/initials

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun gJawab	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	05	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Kota Padang Panjang. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	1 Unit	41,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		20 Unit		30,000,000
1	05	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	1 Unit	22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		4 Unit		50,000,000

f/

Kode	Urusan / Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		90 Persen	156,777,600					90 Persen		178,856,100
1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		12 laporan		3,500,000

f

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun gJawab	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	05	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	28,924,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		24 laporan		34,998,500
1	05	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	124,353,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		12 Laporan		140,357,600

Handwritten signature/initials

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		90 Persen	367,381,118					90 Persen		371,840,753
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	316,456,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		20 Unit		339,238,800

ff

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggungan Jawab
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	05	01	2 09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	35,632,488	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		6 Unit		17,310,133
1	05	01	2 09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	15,291,830	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		1 Unit		15,291,820

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANG ANBENCANA	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100 Persen	1,558,289,050					100 Persen		1,288,440,000
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	persentase warga yang mendapat pelayanan informasi rawan bencana		100 Persen	300,000,000					100 Persen		50,000,000
1 05 03 2.01 0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakansah/legal	- Kota Padang Panjang. Semua Kecamatan. Semua Kel/Desa	1 Dokumen	260,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		- Dokumen		-

Handwritten signature

Kode					Urusan / Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun gJawab			
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Prioritas Nasional	Prioritas Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	05	03	2	01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencanabencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnyaselama 1 (satu) tahun	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160 Orang	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		160 Orang		50,000,000
1	05	03	2	02		Pelayanan Pencegahandan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persentase kesiapan masyarakat terhadap risiko bencana		5 Persen	1,054,936,550					10 Persen		1,112,440,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 05 03 2 02 0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105 Unit	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		105 Unit		30,000,000
1 05 03 2 02 0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 orang	44,298,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		175 Orang		120,000,000

h/

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 05 03 2 02 0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi(pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	960,638,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		12 Dokumen		872,440,000
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100 Persen	131,770,000					100 Persen		90,000,000

Handwritten signature/initials

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 05 03 2 03 0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	131,770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		1 Dokumen		90,000,000
		Jumlah laporan kejadian penyelesaian dan evakuasi korban bencana yang ditangani		90 Laporan						85 orang		
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah kerusakan yang tertangani		100 Persen	71,582,500							
1 05 03 2.04 0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	71,582,500	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK,					
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				10,533,102,430							1,848,834,000

f f

Kode	Urusan / Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		80 Persen	724,939,000					80 Persen		605,000,000
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	presentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu-isu di daerah		80 Persen	724,939,000					80 Persen		605,000,000
8 01 02 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Orang	724,939,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	- Pakaian PASKIBRAKA	80 Orang		605,000,000
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah		100 Persen	8,890,816,830					100 Persen		1,003,084,000

ft

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	presentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya		23 Persen	8,890,816,630					23 Persen		1,003,084,000
8 01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Orang	8,199,999,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	- Hibah TNI/POLRI - Hibah KPU - Hibah BAWASLU	45 Orang		600,000,000

ff

Kode	Urusan / Bidang Urusan /Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8 01 03 2 01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Orang	690,816,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	- Hibah Partai Politik	15 Orang		403,084,000
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku		100 Persen	56,832,150					100 Persen		50,000,000
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi masyarakat yang diberdayakan dan diawasi		65 organisasi masyarakat	56,832,150					65 organisasi masyarakat		50,000,000

89

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8 01 04 2 01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Orang	56,832,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		14 Orang		50,000,000
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik yang tertangani		100 Persen	177,525,700					100 Persen		135,000,000
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	presentase pencegahan potensi konflik akibat gejala ekonomi, masalah sosial dan budaya dikalangan masyarakat		100 Persen	177,525,700					100 Persen		135,000,000

fj

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggun gJawab
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8 01 05 2 01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43 Orang	177,525,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		43 Orang		135,000,000
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah		100 Persen	682,988,950					100 Persen		55,750,000
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	presentase pencegahan konflik sosial yang berkembang ditengah masyarakat		100 Persen	682,988,950					100 Persen		55,750,000

ff

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8 01 06 2 01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59 Orang	682,988,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		59 Orang		55,750,000

BAB V PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen pengelolaan keuangan ditingkat OPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyusun dan menetapkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 - 2023 yang memuat kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik. Kemudian terkait dengan perencanaan tahunan daerah maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Renja masing-masing.

Sehubungan dengan ini maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik juga menyusun dan menetapkan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik ini sangat tergantung pada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsure Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang.

Dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 202, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Padang Panjang, Agustus 2023
**Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Padang Panjang**



I PUTU VENDA, S.STP. M.Si

NIP.19770522 199511 1001

